

**SKRIPSI**  
**IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH PADA**  
**LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN**  
**SORONG (Studi Kasus: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**  
**Kabupaten Sorong)**



Disusun Oleh :  
PUTRI NUR ISNAINI  
146220121010

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**  
**FAKULTAS EKONOMI BISNIS DAN HUMANIORA**  
**UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG**  
**TAHUN 2025**

**HALAMAN JUDUL**

**IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH PADA  
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN  
SORONG (Studi Kasus: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Sorong)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk ujian skripsi  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh  
Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak.)**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI BISNIS DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG  
TAHUN 2025**

## HALAMAN PERSETUJUAN

### HALAMAN PERSETUJUAN

IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH PADA LAPORAN  
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN SORONG (STUDI  
KASUS: BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN SORONG)

NAMA: Putri Nur Isnaini

NIM: 146220121010

Telah disetujui oleh tim pembimbing

Pada , 28 Mei 2025

Pembimbing I



Annisa' Khaerani, S.E., M.Acc.

NIDN. 1407039501

Pembimbing II



Dr. Andi Irwan, M.M.

NIDN. 0906018401

## HALAMAN PENGESAHAN

---

**IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH PADA LAPORAN  
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN SORONG (STUDI  
KASUS: BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN SORONG)**

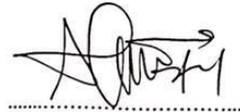
**NAMA** : Putri Nur Isnaini  
**NIM** : 146220121010  
**WAKTU PENELITIAN** : 1 Oktober-28 Mei 2025

Skripsi ini telah di uji oleh Dewan Penguji Skripsi Program Studi  
Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora Universitas  
Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Pada: 13 Juni 2025

Dewan Penguji Skripsi  
Pembimbing Skripsi

**Annisa' Khaerani, S.E., M.Acc.**  
NIDN. 1407039501



Ketua Penguji

**Yusron Difinubun, S.E., M.Acc.**  
NIDN. 1407079001



Anggota Penguji

**Alyn Wulandary, S.E., M.Acc.**  
NIDN. 1409039302



Sorong, 24 juni 2025

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora



  
**Eud Ardiansyah, S.Psi., M.Si.**  
NIDN.1419099401

## HALAMAN PERNYATAAN

### HALAMAN PERNYATAAN

#### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Putri Nur Isnaini

NIM : 146220121010

Judul Skripsi : **Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten Sorong (Studi Kasus: Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sorong)**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Sorong, 24 Juni 2025  
Yang membuat pernyataan,



**Putri Nur Isnaini**

**146220121010**

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

“Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan dan pertanyaan waktu yang menjawabnya, berikan tenggat waktu bersedihlah secukupnya, rayakan perasaanmu sebagai manusia”.

-Baskara Putra –Hindia-

“Jangan berduka, apa pun yang hilang darimu akan kembali lagi dalam wujud lain”

-Jalaluddin Rumi-

### **PERSEMBAHAN**

Kepada setiap jiwa yang singgah dengan tulus, hadir dengan hangat, dan mencintai dalam diam maupun terang. Terima kasih untuk setiap langkah yang bersisian, dan setiap doa yang dititipkan yang diam-diam menguatkan.

## ABSTRAK

Putri Nur Isnaini /146220121010. **Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten Sorong (Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sorong)** Skripsi. Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora. Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Juni 2025.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sebanyak 8.030 kasus permasalahan pada tahun 2018 mengenai ketidakpatuhan pemerintah terhadap peraturan yang tertuang pada undang-undang. Salah satu penyebab yang menjadi permasalahan tersebut yaitu, Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam lingkup desa, masih begitu banyak jumlahnya yang tidak familiar atau kurangnya pemahaman terhadap SAP. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam penyusunan laporan keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sorong, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi selama proses implementasi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam di BPKAD Kabupaten Sorong.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum BPKAD Kabupaten Sorong telah mengimplementasikan SAP sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, implementasi tersebut masih menghadapi kendala, khususnya pada aspek kesiapan aplikasi atau sistem informasi keuangan yang digunakan. Ketidaksiapan dan ketidakstabilan sistem menyebabkan keterlambatan dalam penyajian laporan keuangan, yang berdampak pada efisiensi dan akurasi pelaporan.

**Kata kunci:** SAP Akrua, LKPD, Implementasi SAP, Metode Kualitatif, BPKAD

## KATA PENGANTAR

Pertama-tama puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT. Karena atas segala rahmat-Nya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan proposal dengan judul *“Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten Sorong (Studi Kasus: Badam Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sorong)”*

Skripsi ini dapat terselesaikan tidak terlepas dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Fuad Ardiyansyah, S.Psi., Msi., selaku dekan fakultas ekonomi bisnis dan humaniora Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.
2. Ibu Alyn Wulandary, S.E., M.Ak., Akt. Selaku ketua Program Studi Akuntansi, serta para dosen prodi Akuntansi yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.
3. Ibu Annisa' Khaerani, S.E., M.Acc. selaku dosen sekaligus pembimbing yang selalu bersedia, membantu memberikan arahan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Kedua Orang tua tercinta, ayahanda Hariyanto Solin dan ibunda Warba Indah yang senantiasa memberikan doa serta dukungannya kepada penulis, yang selalu mengusahakan setiap hal-hal baik untuk penulis tanpa mengenal lelah.
5. Sahabat-sahabatku terkasih Yustinah Aisyah, Nur Azisah, Latiffah Dinar, Intan Darmayanti, Felda Ramadani yang telah kebersamai penulis dalam suka duka perkuliahan hingga dititik ini.
6. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri. Putri Nur Isnaini. Terima kasih telah bertahan dan berjuang sejauh ini. Terima kasih karena tetap berdiri, walau sering kali diterpa rasa putus asa pada setiap sesuatu yang belum berhasil. Terima kasih karena tidak lelah untuk mencoba. Semoga kelak kebahagiaan dan keberuntungan selalu menyertai setiap langkah ini.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk penelitian yang lebih baik lagi kedepannya.

Akhir kata, dengan harapan yang besar semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca sekalian.

**Penulis,**

**Sorong, 18 Juni 2025**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Manfaat Penelitian.....	3
1.5 Definisi Konsep.....	4
BAB II LANDASAN TEORI.....	5
2.1 Kajian Teori.....	5
2.2 Penelitian Terdahulu .....	13
2.3 Kesenjangan Penelitian (Research GAP).....	25
2.4 Kerangka Pikir.....	27
BAB III METODE PENELITIAN .....	27
3.1 Jenis Penelitian.....	27
3.2 Waktu dan Tempat Penelitian.....	27
3.3 Desain Penelitian .....	28

3.4 Sumber Data.....	28
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.6 Subjek Penelitian.....	29
3.7 Instrumen Penelitian.....	30
3.8 Teknik Analisis Data.....	31
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>34</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	34
4.2 Hasil Analisis Data dan Pembahasan.....	36
4.3 Keterkaitan Teori Institusional dengan Implementasi SAP.....	46
<b>BAB V KESIMPULAN.....</b>	<b>49</b>
5.1 Kesimpulan.....	49
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	49
5.3 Saran.....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>51</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir .....	27
Gambar 3. 1 Desain Penelitian .....	28
Gambar 3. 2 Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif .....	31

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu .....	13
Tabel 3. 1 Estimasi Waktu Penelitian.....	27
Tabel 3. 2 Subjek Penelitian .....	30
Tabel 3. 3 Indikator Penelitian.....	30
Tabel 3. 4 Instrumen Penelitian .....	30
Tabel 4. 2 Kode Tema dan Kategori Implementasi SAP .....	38
Tabel 4. 3 Perbedaan komponen laporan keuangan basis kas menuju akrual dan basis akrual .....	39
Tabel 4. 4 Kode Tema dan Kategori Kualitas Laporan Keuangan .....	42
Tabel 4. 5 Kode Tema dan Kategori Hambatan Implementasi.....	44
Tabel 4. 6 Kode Tema dan Kategori Evaluasi dan Pengawasan.....	45

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat ijin Penelitian .....	55
Lampiran 2 Instrumen Wawancara BPKAD .....	57
Lampiran 3 Lampiran Instrumen Wawancara Inspektorat .....	59
Lampiran 4 Lampiran Transkrip Wawancara .....	61
Lampiran 5 Lampiran Transkrip Wawancara .....	68
Lampiran 6 Daftar Tema Dan Kode .....	76
Lampiran 7 Member Checking .....	77
Lampiran 8 Dokumentasi .....	78

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang.**

Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah dalam laporan keuangan pemerintah daerah menjadi faktor utama sebagai upaya meningkatkan integritas serta akuntabilitas atas pengelolaan anggaran kepada publik. Pemerintah di Indonesia diharapkan dapat mengimplementasikan Standar Akuntansi Pemerintahan berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah. Dengan diterapkannya standar tersebut, diharapkan laporan keuangan yang dibuat akan menyajikan data keuangan yang akurat bagi semua berkepentingan, termasuk masyarakat, lembaga pengawas, serta pihak-pihak lainnya. Namun pada kenyataannya, masih banyak tantangan dalam implementasi standar pemerintah basis akrual. Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) menemukan sebanyak 8.030 kasus permasalahan pada tahun 2018 menenai ketidakpatuhan pemerintah terhadap peraturan yang tertuang pada perundang-undangan (Fangela 2022). Salah satu penyebab yang menjadi permasalahan tersebut yaitu, Aparatur Sipil Negara(ASN) dalam lingkup desa, masih begitu banyak jumlahnya yang tidak familiar atau kurangnya pemahaman terhadap SAP (Dimas & Hasanudin, 2024). Selain daripada itu, ditetapkan oleh KPK RI kasus tindak pidana korupsi dengan cara mengkondisikan hasil audit BPK Perwakilan Papua Barat yang dilakukan oleh mantan Pejabat Bupati Sorong, mantan Kepala BPKAD beserta jajaran dibidang keuangan sekretaris daerah di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.

Oleh karena itu, pentingnya mengetahui Standar Akuntansi Pemerintah salah satunya guna memahami standar yang berlaku untuk pembuatan laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah/negara, sehingga mendapatkan laporan keuangan pemerintah kualitas tinggi (Septony & Arthur, 2020). Untuk memperoleh laporan keuangan pemerintah yang memiliki kualitas tinggi tentunya laporan keuangan pemerintah perlu memenuhi karakteristik deskriptif sebagaimana dituangkan pada PP Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yaitu; relevan, handal, dapat dibandingkan,

dan dapat dipahami (Maria, 2024). Selain daripada itu, untuk memperoleh laporan keuangan pemerintah yang baik diperlukan juga tindakan mengelola keuangan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yakni mengelola keuangan secara transparans dan akuntabel.

Pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana yang telah ditetapkan pada Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019, mencakup berbagai kegiatan meliputi rancangan, realisasi, penataan, lalu pada pembuatan laporan, serta pertanggungjawaban. Dalam konteks pertanggungjawaban ini, pemerintah daerah sebagai pengelola keuangan publik diharapkan untuk membuat laporan keuangan tepat waktu dan akurat untuk kebutuhan publik (Sanusi, 2020). Proses penyusunan laporan keuangan menjadi elemen krusial bagi suatu instansi untuk mengevaluasi kinerja dan eksistensinya selama periode tertentu (Septony dan Artur, 2020).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dibuat disetiap periode memperoleh penilaian dari Badan Pemeriksa Keuangan sebagai indikator kualitas LKPD yang dihasilkan (Hadi et al. , 2021). Untuk memastikan akuntabilitas, pemerintah telah menetapkan kewajiban bagi seluruh instansi, baik di tingkat pusat atau tingkat daerah, agar pelaporan keuangannya menggunakan standar basis akrual (Putra dan Varina, 2021).

Standar Akuntansi basis akrual konteks pemerintahan mempersilahkan pengakuan pendapatan, biaya-biaya, harta, hutang, serta ekuitas dalam penyajian laporan keuangan/anggaran (Sudaryati dan Permana, 2020). Dengan diterapkannya standar berbasis akrual, pemerintah dapat memberikan gambaran secara keseluruhan mengenai posisi keuangan dan memaparkan informasi yang sebenarnya terkait hak dan kewajibannya (Haq, 2023). Selanjutnya untuk memperkuat penerapan tersebut, ditegaskan pada seluruh entitas pemerintah baik pusat maupun daerah sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013, untuk menerapkan standar akuntansi basis akrual pada pengelolaan keuangan mulai dari tahun 2015 (Anita dan Kusmiawaty, 2023).

Keterkaitan standar akuntansi pemerintah dengan kualitas pada laporan keuangan sejalan dengan teori institusional. Adapun penelitian dari Rizqi Sukma(2023) dengan judul ”Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Provinsi

Sumatera Utara” dengan hasil menunjukkan dimana pengimplementasian SAP pada susunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Labuhanbatu oleh BPKAD telah sejalan pada ketentuan peraturan dalam undang-undang, akan tetapi, masih diperlukan upaya dalam meningkatkan jumlah sumber daya aparatur serta kualitasnya untuk mengelola anggaran disetiap Organisasi Perangkat Data. Berdasarkan fakta tersebut penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian terkait “IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SORONG (Studi Kasus: BPKAD Kabupaten Sorong)” dengan rumusan masalah seperti yang telah ditentukan selain untuk mengetahui apakah laporan keuangan pemerintah Kabupaten Sorong telah sesuai dengan standar yang berlaku juga untuk mengetahui terkait apakah selama pengimplementasian terdapat kendala dan bagaimana aparatur menangani kendala tersebut.

### **1.2 Rumusan Masalah.**

Dari yang telah dipaparkan dilatar belakang tersebut, oleh karena itu rumusan masalah yang ditentukan pada penelitian ini adalah;

1. Apakah laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sorong telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah?
2. Apakah terdapat hambatan yang terjadi dalam implementasi standar akuntansi pemerintah pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?

### **1.3 Tujuan Penelitian.**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut;

- a) Untuk mengetahui implementasi Standar Akuntansi Pemerintah pada pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sorong.
- b) Untuk mengetahui hambatan yang terjadi selama penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

### **1.4 Manfaat Penelitian.**

Manfaat positif diharapkan oleh penulis dari dilaksanakannya penelitian ini adalah;

- a) Manfaat Teoritis.

Dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

b) Manfaat Praktis.

Dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam pengimplementasian Standar Akuntansi Pemerintah pada laporan keuangan pemerintah daerah.

## **1.5 Definisi Konsep.**

### **1.5.1 Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah**

Implementasi standar akuntansi merupakan proses pengaplikasian Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah sesuai yang tertuang pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010.

### **1.5.2 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.**

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan dokumen yang menunjukkan kondisi keuangan, rasio keuangan, serta arus kas pemerintah daerah yang dibuat berdasar pada Standar Akuntansi Pemerintah. Laporan keuangan pemerintah daerah juga salah satu dari rangkaian laporan keuangan SKPD sebagai bentuk dari pertanggungjawaban, manajerial, hingga pengawasan atas kinerja pemerintah daerah.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Kajian Teori.**

##### **2.1.1 Teori Institusional**

Teori institusional Scott (2008) adalah teori dalam keorganisasian yang menjelaskan dimana perilaku dan keputusan organisasi yang tidak hanya ditentukan berdasarkan efisiensi teknis atau tujuan, melainkan dari tekanan lingkungan eksternal, seperti peraturan, norma atau budaya. Teori institusional ini adalah salah satu merupakan salah satu pendekatan dalam ilmu sosial, terutama dalam sosiologi, ilmu politik, dan studi organisasi yang menekankan peran institusi dalam membentuk perilaku individu ataupun organisasi. Dalam teori ini ini terdapat tiga pilar utama yang membentuk tekanan kelembagaan dalam suatu organisasi/instansi, sebagai berikut:

**Pilar Regulatif:** tekanan dari peraturan formal, hukum, dan kebijakan-kebijakan pemerintah

**Pilar Normatif:** tekanan dari nilai-nilai profesional, etika, serta harapan sosial, dan

**Pilar Kognitif:** tekanan dari budaya, cara berpikir, dan asumsi yang dianggap “wajar” oleh masyarakat.

Keterkaitan penelitian ini dengan teori institusional dalam konteks implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sorong bukan semata-mata karena alasan teknis, melainkan karena adanya tekanan eksternal dari pihak kelembagaan, seperti; Pemerintah pusat yang mengatur melalui Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010, Lembaga pengawas dari Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan, serta ekspektasi akuntabilitas publik. Implementasi ini melingkupi penggunaan basis akrual dalam penyusunan laporan keuangan, serta penyampaian laporan ke Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan. Dengan pengimplementasian SAP, mencerminkan adanya kepatuhan instansi terhadap tekanan regulatif dalam teori institusional.

### **2.1.2 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.**

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan wujud pertanggungjawaban manajerial, hingga pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah kepada rakyat atas apa yang telah diwewenangkan dan diamanahkan oleh rakyat pada pimpinan daerah. Selain daripada itu, laporan keuangan menjadi salah satu elemen dari laporan keuangan Satuan Kerja perangkat Daerah yang dibuat kemudian disajikan sebagai media informasi terkait status keuangan hingga setiap transaksi yang terjadi dalam satu periode pelaporan (Septony & Arthur 2020). Laporan keuangan pemerintah juga memiliki manfaat dalam penyajian informasi bagi stakeholder yang dapat untuk digunakan sebagai alat ukur pertimbangan pengambilan keputusan dan kebijakan (Maria Apriyane 2024). Terkait hal ini, pemangku kepentingan terkait laporan keuangan pemerintah meliputi kelompok masyarakat, dewan perwakilan rakyat, badan pengawas dan auditor, investor, serta pihak entitas itu sendiri (Muhammad & Puji 2022). Komponen laporan keuangan pemerintah daerah serupa dengan laporan keuangan pemerintah pusat, yang meliputi; Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

### **2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan**

Kualitas laporan keuangan yang berdasar pada Standar Akuntansi Pemerintah, sebagaimana dijelaskan pada paragraf 32 Lampiran II PP No. 71 Tahun 2010, merupakan ketentuan yang harus diaplikasikan selama proses menyusun laporan keuangan. Hal ini bertujuan guna mendapatkan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para penggunanya laporan tersebut (Dewi Aulia, 2017). Upaya untuk peningkatan kualitas pada laporan keuangan daerah dilakukan mulai dari meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam keuangan publik. Diharapkan, upaya ini dapat memperbaiki kualitas pelayanan publik dan laporan keuangan daerah, dengan diterapkannya prinsip terhadap pengelolaan yang baik dan bersih, bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Terapan tata kelola yang baik (good governance) diharapkan dapat berpengaruh positif terhadap kualitas pada laporan keuangan pemerintah daerah (Fangela, 2022).

Beberapa karakteristik yang menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah berkualitas baik meliputi;

a) Relevan

Sebuah laporan keuangan dianggap relevan jika informasi yang dikandungnya berpotensi mempengaruhi keputusan para pengguna. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengevaluasi peristiwa yang telah terjadi atau yang sedang berlangsung, serta memprediksi masa depan (Septonyan & Arthur, 2020).

b) Andal

Laporan keuangan yang andal adalah laporan berisi penyajian informasi yang bebas dari pemahaman yang bisa menimbulkan kesalahpahaman atau kesalahan material, dan disajikan secara terbuka, terverifikasi, dan bersifat netral.

c) Dapat dibandingkan

Informasi yang tercatat pada laporan keuangan memiliki nilai lebih, apabila mampu menjadi bahan perbandingan dengan laporan keuangan dari periode sebelumnya. Hal ini memungkinkan diambilnya keputusan yang lebih baik lagi dalam penerapan kebijakan akuntansi untuk periode pelaporan berikutnya.

d) Dapat dipahami

Laporan keuangan sebaiknya disajikan secara mudah agar dapat dimengerti pengguna, menggunakan istilah dan bentuk yang sesuai dengan tingkat pemahaman mereka.

Selain karakteristik tersebut, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pada laporan keuangan pemerintah daerah, termasuk implementasi standar akuntansi pemerintah, pengendalian internal, serta keahlian sumber daya pengelola.

Penjelasan mengenai faktor-faktor ini akan diuraikan berikut;

a) Penerapan standar akuntansi pemerintah

Penerapan standar akuntansi pemerintahan merupakan suatu rangkaian penting untuk memahami dengan jelas mengenai standar akuntansi yang berlaku secara umum. Proses ini sangat penting dalam menyusun laporan pertanggungjawaban terhadap anggaran pendapatan dan belanja, agar

dihasilkan laporan keuangan pemerintah yang dinilai telah berkualitas (Septony, 2020).

b) Pengendalian Internal

Pengendalian internal adalah salah satu pedoman dan metode yang dimaksudkan agar memberi keyakinan kepada pihak manajemen bahwa organisasi tersebut dapat meraih sasaran serta tujuannya (Rai 2008 dalam Kartika & Harjanti 2020). Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 60 tahun 2008 terkait sistem pengendalian internal, sistem ini dijelaskan sebagai suatu proses yang integral, melibatkan perbuatan dan aktivitas yang dirancang berkelanjutan oleh pimpinan serta seluruh staff. Proses ini memiliki tujuan untuk memberi keyakinan yang memadai akan dicapainya tujuan dari suatu instansi.

Sistem pengendalian internal mencakup pedoman serta prosedur yang diimplementasikan guna memberi kepastian yang dapat diterima manajemen dimana suatu instansi telah berhasil meraih sasaran tujuannya (Dewi, 2017). Dengan menerapkan sistem pengendalian internal, pemerintah dapat memberikan arahan yang baik, dan memastikan standar akuntansi pemerintah diterapkan dengan tepat, yang kemudian menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) selaras dengan kriteria yang ditetapkan, seperti relevansi, keandalan data, kemampuan untuk dibandingkan, dan mudah dipahami (Hadi., et al 2021).

#### **2.1.4 Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia menjadi elemen krusial pada sebuah lingkup suatu entitas, mencakup seluruh individu yang berperan aktif pada berbagai kegiatan di dalamnya. Dalam Pasal 1 ayat (10) UU Nomor 13 Tahun 2003 terkait Ketenagakerjaan, kompetensi diartikan sebagai keahlian dalam bekerja tiap-tiap orang yang melibatkan kemampuan, keterampilan, serta sikapnya dalam bekerja sejalan dengan pedoman yang telah disahkan. Pada Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46A Tahun 2003 dalam konteks pemerintahan, kompetensi merujuk pada kemampuan serta karakter pegawainya, yang meliputi

pengetahuan, keterampilan, serta sikap dan tingkah laku selama menjalankan tugas serta tanggung jawabnya dengan cara yang profesional, efektif, dan efisien.

Kompetensi pada sumber daya manusia melingkupi kapasitas individual, organisasi, atau suatu sistem dalam merealisasikan tugas dan wewenang yang telah diamanahkan untuk meraih tujuan secara efektif dan efisien (Kartika dan Harjanti, 2020). Menurut Halim & Kusufi, pada bukunya yang berjudul “Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik” mengungkapkan dimana berbagai masalah yang ada mengenai pengelolaan keuangan yang tidak memenuhi standar atau peraturan undang-undang semata-mata bukan hanya karena adanya temuan kecurangan. Tetapi, hal ini akibat dari kurangnya pengetahuan masing-masing pihak yang terlibat proses menyusun laporan keuangan pemerintah dikarenakan latar belakang pendidikan yang tidak selinear dengan perannya. Karenanya, kompetensi aparatur daerah begitu penting, terutama dalam pengelolaan dana keuangan pemerintah daerah, termasuk proses disusunnya laporan keuangan.

### **2.1.5 Good Governance**

Governance semula didefinisikan sebagai pemerintahan, kemudian seiring waktu didefinisikan kembali sebagai pemerintahan (Muhamad., et al, 2021). Secara konseptual *Good Governance* (pemerintahan yang baik), terkandung dua pemahaman yang mendasar, yakni:

- a) Nilai-nilai yang mengutarakan aspirasi dan harapan masyarakat serta prinsip yang dapat memotivasi masyarakat untuk meraih tujuan nasional, mencapai kemandirian, mendukung pembangunan berkepanjangan, dan mewujudkan keadilan sosial;
- b) Komponen operasional pada pemerintahan yang efisien dan efektif saat melaksanakan kewajibannya guna dapat meraih tujuan tersebut

Dengan memahami dua hal tersebut, sistem informasi keuangan daerah seharusnya dapat menjadi strategi bagi pemerintah daerah dalam bertanggungjawab akan agendanya pada masyarakat (Muhamad., et al, 2021).

### **2.1.6 Standar Akuntansi Pemerintah**

Standar Akuntansi Pemerintah berfungsi sebagai panduan dasar bagi pemerintah pusat dan daerah untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran anggaran. Tujuan utama dari standar ini yaitu untuk memastikan bahwa setiap laporan keuangan yang disajikan bersifat transparan, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan hal tersebut, laporan keuangan yang telah disusun kemudian disajikan diharapkan memenuhi kriteria akuntabilitas, kualitas, dan sesuai pada standar yang ditetapkan (Sari, F. M. , 2022). Ketentuan ini tertuang pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah.

Sebelum penerapan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 yang berlandaskan basis akrual, pemerintah telah lebih dahulu menerapkan PP 24 Tahun 2008, yang dikenal sebagai akuntansi basis kas. SAP menjadi standar akuntansi pertama di Indonesia yang secara khusus mengatur pembukuan keuangan dalam konteks pemerintahan (Sanusi, 2020). Sebelumnya, Standar Akuntansi Pemerintah ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, yang mengimplementasikan sistem kas menuju akrual secara sementara, seperti yang tertuang pada Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003.

### **2.1.7 Standar Akuntansi Pemerintah Basis Akrual**

Standar akuntansi pemerintah basis akrual adalah pedoman akuntansi dimana diakuinya pendapatan, biaya-biaya, harta, hutang, dan ekuitas saat menyusun dan disajikannya laporan keuangan menggunakan prinsip akrual (Sudaryati & Permana, 2020). Dengan menerapkan prinsip akrual, kita dapat melihat gambaran yang lebih jelas mengenai suatu posisi keuangan pemerintah sehingga dapat memberikan informasi yang sebenar-benarnya terkait hak dan juga kewajiban pemerintah (Haq, 2023).

Pencatatan akuntansi yang akurat dan tepat waktu untuk seluruh biaya, baik yang sudah dibayar maupun belum, berkontribusi dalam mendukung penilaian akuntansi berbasis akrual yang lebih efektif dan memberikan informasi yang nyata tentang kewajiban di masa depan (Puji., et al. 2024). Pada peraturan pemerintah yang telah disahkan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 yang berbunyi pemerintah daerah Kabupaten dan Provinsi diharuskan

mengimplementasikan standar akuntansi pemerintah basis akrual pada anggaran dimulai dari tahun 2015. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), laporan keuangan basis akrual meliputi dua komponen utama, yakni laporan realisasi anggaran (*budgetary reports*) dan laporan keuangan, yaitu;

**a) Laporan Realisasi Anggaran.**

Laporan Realisasi Anggaran merupakan dokumen yang menyajikan informasi terkait dengan belanja, pendapatan, transfer, surplus atau defisit yang direalisasikan, serta seluruh biaya yang masing-masing dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan pada entitas pelaporan.

**b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.**

Laporan perubahan saldo anggaran lebih merupakan laporan yang memberikan informasi terkait kenaikan atau penurunan saldo anggaran yang lebih selama satu periode.

**c) Neraca.**

Neraca menunjukkan status keuangan pada entitas pelaporan di tanggal tertentu dengan menampilkan aset, kewajiban, serta ekuitas yang dimiliki

**d) Laporan Operasional.**

Laporan Operasional memberikan ringkasan mengenai kinerja operasional yang berkontribusi pada peningkatan ekuitas serta penggunaannya yang dikelola pemerintah pusat dan daerah guna memfasilitasi berbagai program kerja yang diselenggarakan pemerintah dalam pelaporan suatu periode.

**e) Laporan Arus Kas.**

Laporan ini menyuguhkan informasi terkait kas dan setara kas yang berkaitan dengan kegiatan operasional, pendanaan, serta investasi. Laporan ini memberikan gambaran terkait modal awal, penerimaan dana maupun pengeluaran, serta saldo akhir pada kas pemerintah pusat dan daerah dalam satu periode (Puji., et al. 2024). Informasi yang disediakan arus kas dijadikan fungsi sebagai indikator dari jumlah arus kas dimasa mendatang, dan membantu mengevaluasi akurasi perkiraan arus kas yang telah dirancang pada periode sebelumnya.

**f) Laporan Perubahan Ekuitas.**

Laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal akan memberikan wawasan mengenai penggunaan modal atau dana dalam konteks pemerintahan.

**g) Catatan atas Laporan Keuangan.**

Catatan ini menyajikan informasi lebih yang dapat melengkapi isi laporan keuangan.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu**

No.	Nama dan Tahun Peneliti	Judul	Hasil Pembahasan
1.	Anita Sari, Kusmilawaty Kusmilawaty (2023)	Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual untuk Mewujudkan Laporan Keuangan yang Berkualitas	Dari hasil analisis memperlihatkan dimana semua staf pada bagian keuangan memahami Standar akuntansi pemerintahan basis akrual, kendati demikian tingkatan pemahamannya masing-masing berbeda-beda setiap individu . Lebih lanjut, kembali diambil kesimpulan mengenai bahwasanya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan pengimplementasian standar akuntansi pemerintah basis akrual berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010, Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 34 tahun 2015, dan

			<p>Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 23 tahun 2022. Hasil dari pengimplementasian standar ini pun menunjukkan bahwa staff memiliki kepatuhan terhadap peraturan yang telah ditentukan.</p> <p>Pengimplementasian basis akrual telah meningkatkan integritas serta kualitas dari laporan keuangan instansi, yang dibuktikan dengan keterbukaan dan akuntabilitasnya, dikarenakan penggunaan FMIS berbasis SIMDA.</p>
2.	Dimas Hardiansyah, Hasanudin (2024)	<p>Pengaruh standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia(SDM) terhadap kualitas laporan keuangan kementerian desa, pembangunan daerah</p>	<p>Secara signifikan standar akuntansi pemerintah meningkatkan kualitas laporan keuangan.</p> <p>Standar akuntansi pemerintahan adalah instrumen yang sangat krusial guna memperkuat akurasi laporan keuangan dan untuk menguatkan sistem tata kelola</p>

		tertinggal dan transmigrasi melalui sistem pengendalian intern pemerintah	keuangan pemerintah. Dengan mengimplementasikan standar ini dengan konsiten, pemerintah dapat menciptakan laporan keuangan yang dapat dipercaya, jelas, serta akuntabel, hingga kemudian dapat membangun rasa percaya masyarakat terkait pengelolaan anggaran negara
3.	Rizqi Sukma Sari Putri(2023)	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara	Pengimplementasian standar akuntansi pemerintah pada proses menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Labuhanbatu yang dijalankan BPKAD sudah beroperasi berdasarkan ketentuan pada peraturan perundangan, kendati demikian, masih sangat diperlukan upaya guna meningkatkan jumlah sumber daya staff pengelola anggaran di

			<p>setiap OPD serta kualitasnya. Peningkatan pada pemantauan atasan langsung juga diperlukan diseluruh jenjang baik pada tingkat Pemerintah daerah ataupun organisasi perangkat daerah. Tantangan teridentifikasi dimana belum tersedia prosedur pelaksanaan yang konkrit dalam pengimplementasian standar akuntansi pemerintah basis akrual, dan minimnya keahlian serta kuantitas sumber daya staff yang menyusun laporan keuangan standar akuntansi pemerintah basis akrual. Sementara itu, tindakan tengah dilangsungkan dengan meningkatkan keahlian dan kuantitas sumber daya staff yang dikhususkan memiliki latar belakang pendidikan akuntansi</p>
--	--	--	---

			atau yang selinear serta mengimplementasikan prosedur operasional
4	Maria Apriyane Patty(2024)	Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada BPKAD Kota Sorong	Hasil penelitian mengungkapkan; standar akuntansi pemerintah memberikan pengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, maka dari itu hasil ini menunjukkan adanya peningkatan dalam pengimplementasian standar akuntansi basis akrual, Akibatnya, laporan keuangan pemerintah daerah juga akan semakin mengalami kemajuan kualitas. Adapun pada sistem pengendalian internal, yang juga memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, memberikan gambaran jika pengendalian internal ditingkatkan maka kualitas pada laporan keuangan pemerintah

			daerah juga semakin meningkat.
5.	Fangela Myas Sari(2022)	Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, kualitas aparatur pemerintah daerah, good governance dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah (studi empiris pada Kabupaten Batang).	Hasil menunjukkan dimana standar akuntansi pemerintahan memberi pengaruh pada tingkat kualitas laporan keuangan pemerintah, jadi hasil membuktikan bahwa dengan menerapkan standar pemerintah basis akrual maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Begitu pula sistem pengendalian internal, yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, hal ini mencerminkan peningkatan pada sistem pengendalian internal, dapat membuat laporan keuangan pemerintah daerah mengalami meningkatnya kualitas.
6.	Sanusi Ariyanto(2020)	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan	Berdasarkan analisis serta pembahasan dibagian sebelumnya,

		<p>Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun 2018</p>	<p>maka didapatkan hasil yang kemudian disimpulkan berikut ini;</p> <p>1) Hasil pertama uji hipotesis menggambarkan pengimplementasian standar akuntansi pemerintahan yang memberi pengaruh pada tingkat kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hal tersebut, artinya instansi pemerintah yang mengimplementasikan standar basis akrual akan memberikan dampak atau pengaruh positif untuk menunjang kualitas pada laporan keuangan pemerintah daerahnya.</p> <p>2) Pada pengujian hipotesis yang ketiga menunjukkan kompetensi sumber daya manusia yang juga turut memberi pengaruh kualitas pada laporan keuangan pemerintah daerah.</p>
--	--	--	--

			Artinya, aparatur pemerintah yang benar-benar mempunyai keahlian/berkompetensi dalam membuat laporan keuangan dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tersebut.
7.	Muhammad Iqbal Alal Maula, Puji Wibowo (2022).	Meneropong Determinan Opini LKPD Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.	Mengacu pada hasil uji regresi, diketahui hanya variabel temuan hasil audit yang memiliki pengaruh pada opini audit Badan Pengawas Keuangan dengan simbol yang tidak positif. Artinya, semakin banyak temuan audit, dapat mengurangi kualitas laporan keuangan. Temuan audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara yang hingga kini terdapat ratusan jumlah, mencerminkan adanya masalah yang kompleks

			<p>pada lingkup tata kelola keuangan daerah tersebut. Lain halnya, pada tingkat pengungkapan dinilai tidak memberi efek berdasarkan data pada opini audit. Artinya informasi yang tercatat dalam Catatan atas Laporan Keuangan dianggap tidak bisa dijadikan bahan acuan bagi auditor dalam memberikan opini. Karakteristik pemerintah daerah juga kurang dapat membuktikan pengaruhnya untuk variabel penjelas dalam perbedaan opini audit antar daerah di Sumatera Utara. Kenyataan ini, mengisyaratkan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam lingkup pendapatan asli daerah bisa jadi tidak mengungkapkan adanya pluralitas, akibatnya</p>
--	--	--	--

			belum bisa mendeskripsikan variasi terhadap kualitas laporan keuangan antar daerah.
8.	Hadi Jauhari, Suhairi Hazisma, Evada Dewata (2021)	Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.	Hasil yang didapatkan menjadi bukti bahwasanya standar akuntansi pemerintah yang di implementasikan sejalan dengan sistem keuangan daerah, mampu memberikan dampak besar terhadap kualitas pada laporan keuangan pemerintah daerah, meskipun pada kenyataannya sistem pengendalian internal pemerintahnya yang dinilai belum cukup mampu menjembatani pengaruh dari standar akuntansi pemerintah serta sistem akuntansi keuangan daerah dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menjadi alasan yang agar terus menjaga kualitas laporan keuangan, sesuai prinsip

			yang terdapat dalam Badan Pemeriksa Keuangan Indonesia dan sebaiknya ditimbang kembali guna mengidentifikasi titik lemah yang terdapat pada pengendalian intern pemerintah, terkhusus pada aspek penilaian risiko terhadap Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah di Provinsi Sumatera Selatan.
9.	Septony B. Siahaan dan Arthur Simanjuntak (2020)	Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah, Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara)	<p>a) Penggunaan sistem informasi daerah memberi pengaruh baik dan cukup signifikan dalam kaitannya dengan kualitas laporan keuangan.</p> <p>b) Pemahaman terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan memberi impact positif dan krusial dalam kualitas di laporan keuangan.</p> <p>c) Sistem pengendalian internal pemerintahan turut memberipengaruh yang positif dan cukup</p>

			<p>substantif sehubungan dengan kualitas laporan keuangan.</p> <p>d) Pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah, pemahaman terkait standar pemerintah, serta sistem pengendalian internal dalam pemerintahan yang diaplikasikan serentak memberi pengaruh positif dan signifikan atas kualitas laporan keuangan.</p>
10.	Kartika dwi indrayanti, Harjanti widiastuti(2020)	<p>Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Satuan Kerja</p>	<p>Penelitian ini mengemukakan hasil penerapan SAKD yang ternyata tidak memberikan dampak atau pengaruh pada kualitas laporan keuangan, lain halnya pada SPI yang justru memberi pengaruh baik untuk kualitas laporan keuangan. Dalam hasilnya pun didapatkan temuan dimana kompetensi yang dimiliki sumberdaya manusia</p>

		Perangkat Daerah Kabupaten Klaten)	cukup memberi peranan penting dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan. Simpulan ini dinyatakan oleh adanya pengaruh yang positif karena diterapkannya SAKD dan SPI terhadap tingkat kualitas laporan keuangan ketika SDM yang berkaitan langsung dengan penyusunan laporan keuangan memiliki pengetahuan/kompetensi yang mumpuni. Hal ini membuktikan bahwa keberhasilan system sangat bergantung pada setiap sumber daya manusia yang menjalankan system tersebut.
--	--	---------------------------------------	---

### 2.3 Kesenjangan Penelitian (Research GAP).

Dilansir dari buku *Pengantar Metode Penelitian Manajemen*, kesenjangan penelitian (*research GAP*) adalah kesenjangan atau celah dari suatu penelitian yang timbul pada pembahasan secara sistematis untuk menarik kesimpulan yang masih terbatas. Dengan kata lain, maksud dari *research GAP* dalam konteks penelitian baru adalah perbedaan atau kesenjangan antara penelitian yang sedang

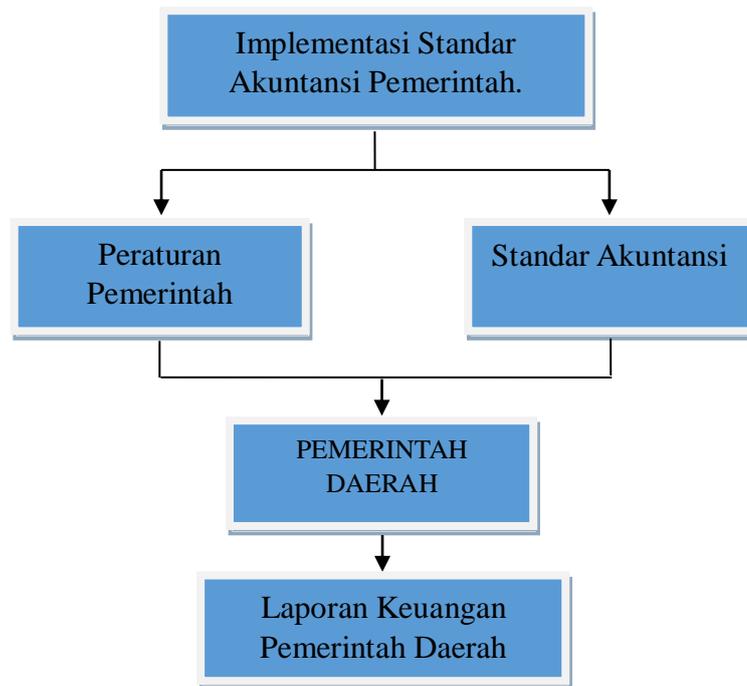
dilaksanakan dengan penelitian sebelumnya. Adapun *GAP* dari penelitian ini dengan yang terdahulu, yakni letak lokasi yang berbeda, dimana penelitian ini berlokasi di Kabupaten Sorong yang dikategorikan oleh Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara sebagai daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Selain daripada itu, *GAP* penelitian ini dengan penelitian lebih dulu seperti penelitian oleh Anita Sari, Kusmilawaty Kusmilawaty (2023) dengan judul “Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akruwal untuk Mewujudkan Laporan Keuangan Yang Berkualitas” terdapat juga pada fokusnya. Penelitian terdahulu cenderung fokus terhadap output atau hasil dari diterapkannya Standar Akuntansi Pemerintah, sedangkan pada penelitian ini peneliti selain fokus pada output juga fokus pada hambatan dan rintangan dalam pengimplemntasian Standar Akuntansi Pemerintah sehingga mendapatkan hasil implementasi pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

## 2.4 Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah gambaran yang memberikan penjelasan mengenai aspek-aspek dalam penelitian mengenai Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

**Gambar 2. 1 Kerangka Pikir**



Kerangka pikir di atas menjelaskan mengenai pengimplementasian standar akuntansi pemerintah yang merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 terkait SAP dan Standar Akuntansi yang melibatkan pemerintah daerah selaku pemangku kepentingan dan penyusun laporan keuangan pemerintah Kabupaten Sorong.

## BAB III METODE PENELITIAN

### 3.1 Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan melakukan observasi yang kemudian disajikan secara deskriptif/naratif. Dalam Dewi, (2017) Penelitian Kualitatif merupakan studi kasus yang dimana peneliti mencoba memahami mengenai fenomena yang tengah terjadi pada subjek penelitian yang dituju, seperti : tingkah laku, pandangan, motivasi perilaku dan sebagainya, secara menyeluruh dan dengan konteks khusus yang alamiah.

### 3.2 Waktu dan Tempat Penelitian.

#### 3.2.1 Tempat Penelitian

Tempat penelitian adalah tujuan bagi penulis untuk melaksanakan penelitiannya. Adapun tempat pada penelitian ini adalah kantor BPKAD Kabupaten Sorong, yang dimana BPKAD memiliki peranan penting dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah sehingga dapat memberikan informasi serta wawasan tentang penggunaan dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

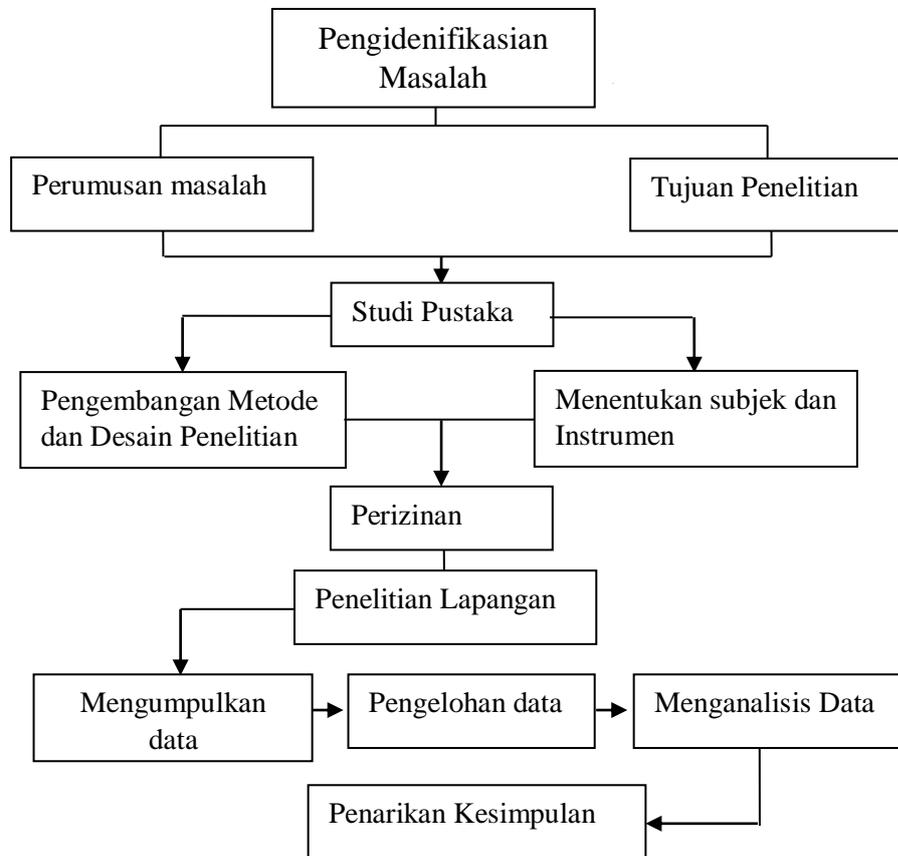
#### 3.2.2 Waktu Penelitian

**Tabel 3. 1 Estimasi Waktu Penelitian**

Rincian Proses	Estimasi Waktu Penelitian									
	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
	Tahun 2024				Tahun 2025					
Pengajuan Judul										
Penyusunan Proposal										
Bimbingan dan Revisi										
Seminar Usulan Proposal										
Penelitian Lapangan										
Penyusunan hasil penelitian										
Sidang Skripsi										

### 3.3 Desain Penelitian

Gambar 3. 1 Desain Penelitian



### 3.4 Sumber Data

Sumber yang diambil dari penelitian ini yakni data primer dan data sekunder. Data primer adalah fakta atau dokumen yang didapatkan dengan survey lapangan dengan mempergunakan seluruh metode pengumpul data asli, sedangkan data sekunder berupa data yang sudah disusun oleh entitas pengumpul data dan diterbitkan ke publik, Kuncoro (2003:127). Secara umum, data dalam penelitian ini didapatkan dari kantor Badan Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Sorong.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data.**

Teknik Pengumpul data yang dilakukan dalam penelitian meliputi;

#### **3.5.1 Wawancara**

Teknik ini dilakukan dengan turun langsung dan melaksanakan proses wawancara kepada informan pada lokasi objek yang terpilih, yaitu Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah. Interview/mewawancarai informan berkaitan dengan penelitian ini guna mendapat informasi yang berkesinambungan dengan yang ingin diketahui. Wawancara pada penelitian ini berupa teknik wawancara terstruktur menggunakan instrumen pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya.

#### **3.5.2 Dokumentasi**

Dokumentasi ialah suatu pengambilan data dengan dikumpulkannya dokumen-dokumen, atau arsip-arsip dan lain sebagainya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian seperti laporan-laporan keuangan pemerintah Kabupaten Sorong, dan dokumen pendukung lainnya. Teknik ini dilakukan dengan cara mencari, membaca, dan menelusuri sumber-sumber tulisan yang terdahulu, baik dari buku, jurnal, laporan penelitian, internet, dsb.

### **3.6 Subjek Penelitian.**

Pada penelitian kualitatif, subjek penelitian dapat disebut sebagai partisipan dan dipilih secara purposif agar dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai penelitian yang ingin dilakukan (Creswell). Dalam menentukan subjek pada penelitian ini, penulis memakai teknik *Snowball Sampling*. Teknik ini dipergunakan agar mendapatkan informasi dari informan awal ke informan selanjutnya agar wawancara dapat dilakukan dengan lebih mendalam.

Adapun rencana subjek penelitian yang berkaitan dengan maksud yang ingin diteliti yaitu;

**Tabel 3. 2 Subjek Penelitian**

<b>Partisipan</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Kriteria</b>
Pihak 1	Pegawai BPKAD Kabupaten Sorong	Terkhusus yang menangani penyusunan laporan keuangan daerah
Pihak 2	Auditor Inspektorat	Pihak eksternal yang memeriksa
Pihak 3	Staff Bidang Akuntansi dan Keuangan	Penyusun laporan dan penanggung jawab penerapan kebijakan akuntansi pemerintah

### 3.7 Instrumen Penelitian

Instumen merupakan alat pengumpul data. Instrumen yang dapat reliabel untuk dipergunakan sebagai alat bantu pengumpul data adalah instrumen yang baik kualitasnya. Instrumen yang berkualitas rendah dapat bersifat berat sebelah atau bias sehingga dapat mengarahkan responden untuk mengambil jawaban-jawaban tertentu (Sanusi, 2020).

Indikator untuk menilai implementasi dan kesesuaian standar akuntansi pemerintah (SAP) basis akrual meliputi;

**Tabel 3. 3 Indikator Penelitian**

<b>Aspek</b>	<b>Indikator</b>
Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah	Kesesuaian laporan keuangan terhadap pedoman SAP sesuai PP No. 71 Tahun 2010, yakni Basis Akrual.
Akuntansi Basis Akrual	Pengakuan adanya pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas.
Penyajian Laporan Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelengkapan komponen pada laporan keuangan seperti ;Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.</li> <li>2. Relevan, Andal, Dapat dipahami, dan Dapat dibandingkan</li> </ol>

Berlandaskan indikator yang ada, disusunlah instrumen penelitian sebagai berikut;

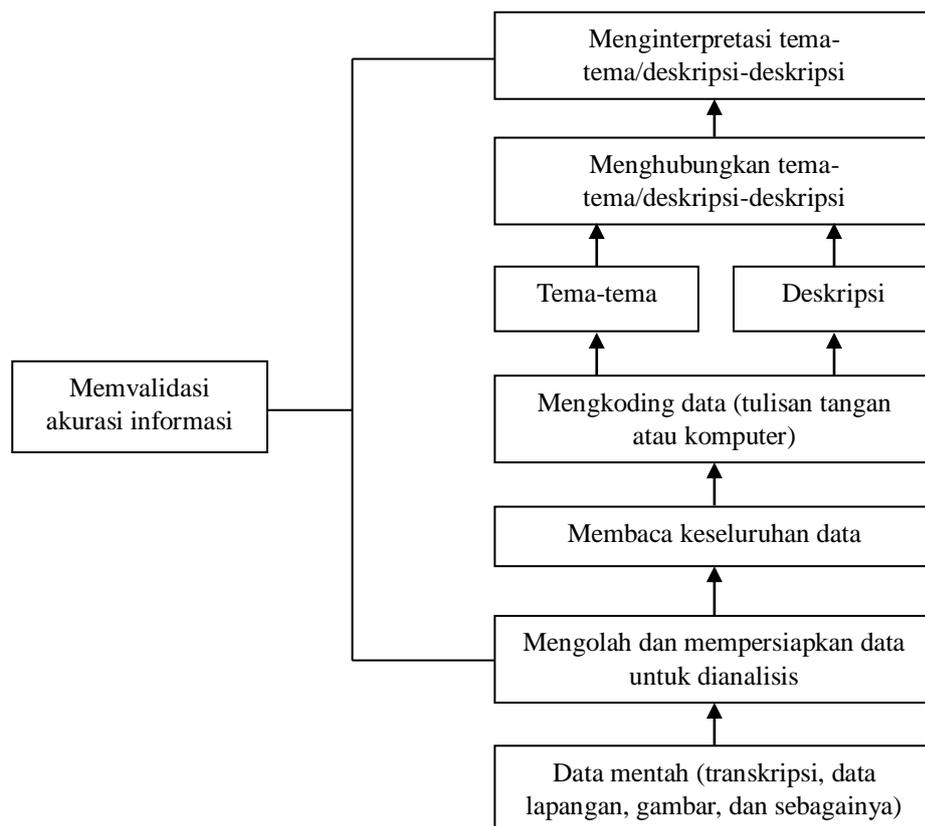
**Tabel 3. 4 Instrumen Penelitian**

<b>Item</b>	<b>Kode Pertanyaan</b>
Informasi Umum Responden	A1, A2
Pembuka	B1, B2, B3, B4
Implementasi dan Kesesuaian standar	C1, C2, C3, C4, C5
Penyajian Laporan Keuangan	D1, D2, D3
Hambatan	E1, E2, E3, E4
Penutup	F1, F2

### 3.8 Teknik Analisis Data

Teknik yang dipilih peneliti untuk melakukan analisis data adalah teknik deskriptif. Dalam teknik ini data-data yang diperoleh dikumpulkan dan dikelompokkan, kemudian di analisis guna mempermudah penafsiran data atau membuat kesimpulan (Sukran., et al 2022). Analisis data pada penelitian, diawali dengan melakukan interaksi wawancara bersama informan yang telah ditentukan. Selama wawancara penulis mencatat jawaban informan serta merekam percakapan sesuai dengan persetujuan pihak-pihak yang berinteraksi. Pada penelitian, peneliti juga mengobservasi dengan tujuan mendapatkan data nyata atau informasi lainnya berupa Laporan-laporan keuangan pada pemerintah daerah. Kemudian, data yang diperoleh dianalisis melalui tahapan-tahapan berikut;

**Gambar 3. 2 Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif**



Sumber; (Creswell, 2013)

Tahap I : Mentranskrip data

Setelah melakukan wawancara dan didapatkan hasilnya, penulis menganalisis data dengan menyusun transkrip dari hasil wawancara. Proses ini dilakukan dengan cara mendengarkan hasil rekaman percakapan selama wawancara untuk disesuaikan oleh catatan peneliti.

Tahap II : Reduksi Kata

Langkah selanjutnya, penulis dengan cermat dan teliti melakukan reduksi kata untuk mengambil informasi inti yang bermanfaat dan berkaitan dengan penelitian ini dengan tetap memperhatikan ketepatan dan kesesuaian jawaban informan.

Tahap III : Kategorisasi Data

Di tahap ini, peneliti mulai melakukan pengkodean (*coding*) seluruh data, mengklasifikasikan informasi berdasarkan berbagai masalah yang telah diamati dan diteliti, selanjutnya data tersebut dikategorisasikan antara data lapangan dan data sekunder. Dalam proses *coding* peneliti menggunakan aplikasi Nvivo. Selanjutnya peneliti, menghubungkan sekumpulan data tersebut agar didapatkan hasil yang relevan.

Tahap IV : Deskripsi dan Interpretasi

Tahap akhir, data yang telah dikategorisasikan atau *coding* di deskripsikan dan diinterpretasikan. Tahapan ini akan memaparkan kembali deskripsi serta tema-tema yang ada melalui penjabaran dengan pendekatan naratif yang lebih mendalam. Selanjutnya adalah membuat interpretasi atau menafsirkan data. Pada tahapan ini, peneliti menentukan hasil dari penelitiannya bersifat *pro* atau kontra terhadap penelitian terdahulu.

Untuk mendapatkan data yang valid dan kemudian di analisis, perlu dilakukan pengujian validitas dan realibilitas lebih dulu pada poin-poin instrumen agar dapat diketahui layak atau tidaknya untuk digunakan sebagai pengumpul sebelumnya.

Untuk mendapatkan data yang valid dan kemudian di analisis, perlu dilakukan uji keabsahan data terlebih dahulu pada poin-poin instrumen agar dapat diketahui layak atau tidaknya untuk digunakan sebagai pengumpul data.

### **3.8.1 Uji Validitas**

Uji validitas ialah suatu alat yang dipergunakan untuk mengukur tingkat validitas atau ketepatan hasil instrumen tersebut. Dalam hal ini, penulis menggunakan teknik Triangulasi. Menurut Moleong dalam Prasetya (2021), Triangulasi merupakan teknik yang memeriksa kebenaran data dengan mempergunakan sesuatu lainnya diluar dari data tersebut untuk sebuah keperluan verifikasi atau sebagai alat untuk membandingkan data yang ada. Pada penelitian ini, triangulasi yang dipilih adalah;

#### **Triangulasi Sumber (Data)**

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengkaji kembali yang kemudian membandingkan suatu informasi yang telah diperoleh dari sumber lainnya pada metode kualitatif.

### **3.8.2 Uji Reabilitas**

Dalam penelitian kualitatif, reabilitas mengacu pada konsistensi dan kestabilan data dalam proses olah data. Pada penelitian ini penulis melakukan uji reabilitas dengan cara *Audit Trail*, yaitu dengan menyimpan hasil transkrip wawancara.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **4.1.1 Sejarah Singkat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Sorong**

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sorong terbentuk atas Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2016 mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sorong. Dengan terbentuknya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sorong, maka BPKAD Kabupaten Sorong memiliki wewenang dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, dimana memiliki peran dalam membantu dan menjadi penunjangurusan pemerintah. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, BPKAD Kabupaten Sorong memiliki beberapa fungsi lainnya, seperti;

- a) Merumuskan standar operasional bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b) Menyusun program kerja, keuangan, mengelola administrasi umum serta kepegawaian bidang;
- c) Merumuskan pedoman teknis mengenai pelaksanaan tugas pada bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d) Mengkoordinasikan pembuatan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah juga Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- e) Merencanakan, membina, mengembangkan, mengendalikan, dan mengawasi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- f) Pelaksanaan kesekretariatan dan;
- g) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diamanahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 4.1.2 Visi dan Misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

##### a) Visi

**“Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional dalam rangka mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).”**

Adapun arti yang terkandung dalam visi tersebut ialah;

**Profesional** memiliki arti yakni bekerja berdasarkan pada disiplin ilmu, memiliki kemampuan serta ahli dalam bidangnya.

**Pengelolaan Pendapatan** artinya strategi yang terencana, terukur, dan optimis serta tersistem melalui agenda yang hendak dilaksanakan untuk mencapai pertumbuhan pendapatan sebagai satu dari sekian komponen penting ketika merealisasikan operasional pemerintahan di Kabupaten Sorong.

**Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah** terkait keseluruhan agenda yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga ke pengawasan keuangan dan aset daerah.

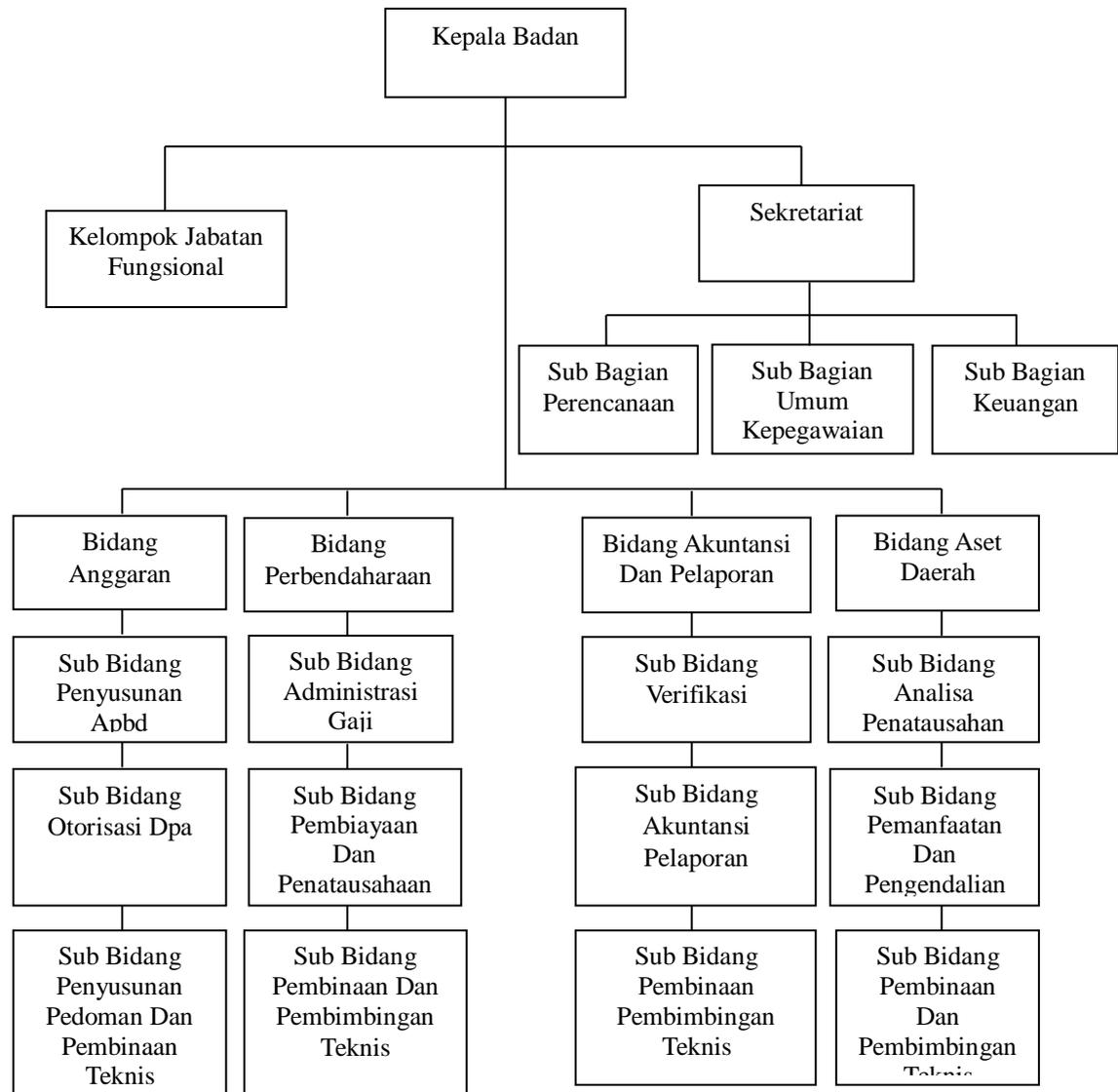
**Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** mengandung arti yang dimana BPKAD diharapkan agar dapat memotivasi serta mengontrol pengelolaan keuangan dan aset daerah agar mampu pertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia selama 10 tahun terakhir berturut-turut.

##### b) Misi

Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, profesional dan akuntabel berorientasi pelayanan publik yang prima.

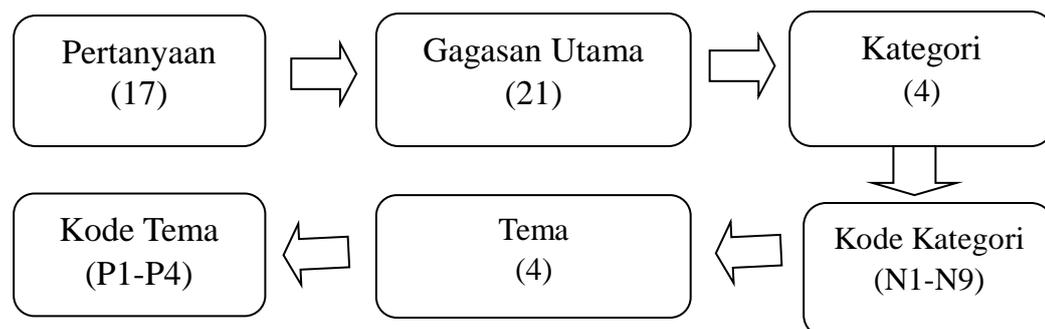
### 4.1.3 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

**Gambar 4. 1 Struktur Organisasi BPKAD Kabupaten Sorong**



(Sumber; BPKAD Kab. Sorong)

### 4.2 Hasil Penelitian



Pada gambar 4.2 di atas, diketahui bahwa wawancara telah dilaksanakan dengan 17 pertanyaan, kepada 2 informan. Kemudian berdasarkan uraian dari latar belakang serta rumusan masalah, pada sub bab ini akan menyajikan hasil penelitian yang terkait. Hasil penelitian yang disajikan didapatkan dari proses observasi dan wawancara oleh informan yang dianggap mengetahui serta memahami terkait implementasi standar akuntansi basis akrual pada laporan keuangan pemerintah daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sorong. Hal ini guna menjamin ketepatan informasi yang disampaikan informan kepada peneliti. Temuan-temuan dari hasil kajian lapangan yaitu observasi dan wawancara, disajikan berupa metode deskriptif untuk menjawab rumusan masalah yang telah diuraikan yakni terkait apakah laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sorong telah sejalan dengan Standar Akuntansi Pemerintah serta hambatan yang terjadi dalam implementasi standar akuntansi pemerintah pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

#### **4.2.1 Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Basis Akrual**

Implementasi Standar Akuntansi merupakan proses dari penerapan prinsip, standar, serta sistem akuntansi, dalam pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan dalam pelaporan transaksi keuangan. Tujuan dari implementasi Standar Akuntansi Pemerintah sendiri tidak hanya sebatas untuk pelaporan keuangan yang tertib dan transparan. Lebih luasnya, implementasi SAP diharapkan dapat mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pengimplementasian standar akuntansi pemerintah secara teknis, maka peneliti membahas beberapa kategori.

Tabel 4. 1 Kode Tema dan Kategori Implementasi SAP

TEMA	KT	KATEGORI	KK	Tipe Kode	Ref		Total
					Rp1	Rp2	
Implementasi SAP Berbasis Akrua	P1	Penerapan SAP	N1	Deductive	2	4	6
		Komponen Laporan Keuangan	N2	Deductive	1	1	2
		Pencatatan akun belanja	N3	Deductive	0	1	1
		Pengakuan akun pendapatan dan beban	N4	Inductive	1	1	2

**a. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sorong.**

Pemerintah daerah diharuskan mengimplementasikan Standar Akuntansi Pemerintah Basis Akrua pada Laporan Keuangannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010. Oleh karena itu, Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sorong sebagai instansi pemerintah daerah yang mengerjakan pembuatan laporan keuangan pemerintah daerah telah menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrua. Hal ini diungkapkan oleh staff keuangan BPKAD Kabupaten Sorong penyusun laporan keuangan mengatakan;

*"Sudah ada dalam sini"*(menunjuk buku pedoman penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah) (RP1, N1, P1).

*"Sudah pakai itu, sejalan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 lampirannya tentang SAP (sembari menunjukkan pedoman yang ada)"* (RP1, N1, P1).

Pernyataan ini didukung oleh Kasubag Evaluasi dan Pelaporan dari instansi Inspektorat sebagai pengawas atau pemeriksa internal Kabupaten Sorong, yang juga mengatakan bahwa Laporan Keuangan yang disusun Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah telah sejalan dengan SAP berbasis

akrual. Meskipun hanya berupa pengakuan singkat seperti *“Iya, Sudah”* (RP2, N1, P1).

*”LKPD Kabupaten Sorong yang disusun oleh BPKAD telah sesuai dengan SAP berbasis akrual”*(RP2, N1, P1)

Hal ini tetap mencerminkan adanya pengakuan secara tidak langsung bahwa dalam pelaporan keuangan telah sesuai dengan ketentuan standar. Hal ini menunjukkan adanya kesesuaian formal antara praktik pelaporan keuangan di BPKAD dengan kebijakan akuntansi pemerintahan yang telah ditetapkan.

**b. Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong.**

Standar Akuntansi Basis Akrual dan standar terdahulu dapat dibandingkan dari komponen laporan keuangannya, dimana akuntansi basis akrual memiliki komponen yang lebih rinci. Adapun perbedaan komponen laporan keuangan basis kas menuju akrual dengan basis akrual adalah sebagai berikut;

**Tabel 4. 2 Perbedaan komponen laporan keuangan basis kas menuju akrual dan basis akrual**

<b>Komponen Basis Kas Menuju Akrual</b>	<b>Komponen Berbasis Akrual</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Laporan Realisasi Anggaran (LRA)</li> <li>➤ Neraca</li> <li>➤ Laporan Arus Kas</li> <li>➤ Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Laporan Realisasi Anggaran (LRA)</li> <li>➤ Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih</li> <li>➤ Neraca</li> <li>➤ Laporan Operasional</li> <li>➤ Laporan Arus Kas</li> <li>➤ Laporan Perubahan Ekuitas</li> <li>➤ Catatan atas Laporan Keuangan</li> </ul>

Terkait komponen-komponen laporan keuangan yang harus dipenuhi ini, responden dari pihak BPKAD tidak menjawab secara eksplisit, dan hanya

menunjukkan buku pedoman SAP yang digunakan tanpa menjelaskan mengenai ketujuh komponen tersebut namun dapat diartikan seperti

*“Iya sudah, seperti yang tertera dalam buku pedoman standar akuntansi pemerintah” (RP1, N2, P1)*

Kemudian, adanya penegasan dari Kasubag Evaluasi dan Pelaporan sebagai pemeriksa laporan keuangan pemerintah daerah yang dibuat BPKAD Kabupaten Sorong dimana dikatakan bahwa:

*“Laporan keuangan Pemda harus terdiri dari tujuh ini toh”. (RP2, N2, P1)*

Penegasan ini, mengartikan bahwa pemenuhan komponen tersebut adalah syarat mutlak agar laporan yang dibuat dapat diterima oleh BPK. Meskipun tidak terdapat jawaban secara eksplisit dari pihak BPKAD terkait pemenuhan komponen tersebut namun, pernyataan dari pihak inspektorat menunjukkan bahwa BPKAD Kabupaten Sorong telah memenuhi tujuh komponen tersebut. Hal ini didasari pada fakta dimana laporan keuangan yang dibuat telah diperiksa pihak inspektorat yang kemudian diperiksa kembali atau di audit oleh BPK.

**c. Pencatatan Akun Belanja di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sorong.**

Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), akun belanja memiliki peranan penting untuk mencerminkan pengeluaran yang direalisasikan pemerintah daerah. Akun belanja juga dilandasi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 terkait pengimplementasian standar akuntansi pemerintah basis akrual. Berdasarkan hal tersebut, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai penyusun laporan keuangan telah mengakui adanya akun belanja. Didukung kembali oleh pernyataan yang diungkapkan oleh Bapak Mateus bahwa;

*“LKPD Kabupaten Sorong yang disusun oleh BPKAD telah sesuai dengan SAP berbasis akrual, meliputi semua akun belanja sebagaimana PP 71 Tahun 2010, serta Perbup Nomor 23 Tahun 2015 tentang SAP Kab. Sorong, dan Perbup Nomor 27 Tahun 2017 tentang perubahan atas perbup*

***Sorong Nomor 22 Tahun 2015 tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sorong...*** (RP2, N3, P1)

Pencatatan akun belanja telah sesuai dengan standar basis akrual yang merujuk atas peraturan pemerintah nomor 71 Tahun 2010, serta Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 sebagai standar yang berlaku di pemerintahan Kabupaten Sorong. Dijelaskan pula bahwa, setiap daerah memiliki peraturannya sendiri mengenai standar akuntansi. Namun standar pada masing-masing daerah tetap memperhatikan aturan yang berlaku dari pusat atau standar akuntansi umumnya.

**d. Pengakuan Akun Pendapatan dan Beban pada Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sorong.**

Pengakuan akun pendapatan merupakan proses pencatatan pendapatan dalam laporan keuangan disaat pendapatan tersebut telah benar-benar dihasilkan, bukan saat kas diterima. Sedangkan pengakuan beban merupakan pencatatan pengeluaran yang telah terjadi. Begitu pula, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sorong, dalam membuat laporan keuangan mengakui atau mencatat adanya akun pendapatan dan beban seperti yang diungkapkan oleh Ibu Karmila sebagai penyusun ketika diberikan pertanyaan mengenai pengakuan akun pendapatan dan beban sesuai basis akrual, yang mengungkapkan;

*” Pasti to, kan tidak mungkin kita keluar dari situ”* (Menunjuk buku pedoman laporan keuangan pemerintah daerah). (RP1, N4, P1)

Untuk hal ini pun sudah disetujui oleh pihak Inspektorat sebagai pengawas yang turut memberikan pernyataan singkat seperti;

*“Iya”* (RP2, N4, P1). Dalam pertanyaan *”Apakah dalam laporan keuangan yang disusun oleh BPKAD mengakui adanya pendapatan dan beban sesuai dengan prinsip akuntansi berbasis akrual?”*

Dari jawaban tersebut menunjukkan bahwa menurut pihak inspektorat, BPKAD Kabupaten Sorong telah mengakui akun pendapatan dan beban sebagaimana yang tercatat pada standar basis akrual.

#### 4.2.2 Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan pemerintah ditetapkan dari berbagai aspek. Laporan keuangan pemerintah yang kualitasnya baik menandakan bahwa pemerintah tersebut dapat penanggungjawab atas mandat yang diamanahkan dalam melaksanakan kewajibannya yakni mengkoordinasikan organisasi atau instansinya. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah dapat dilihat dari kategori sebagai berikut;

**Tabel 4. 3 Kode Tema dan Kategori Kualitas Laporan Keuangan**

TEMA	KT	KATEGORI	KK	Tipe Kode	Ref		Total
					Rp1	Rp2	
Kualitas Laporan Keuangan	P2	Penyajian Laporan Keuangan	N5	Deductive	2	0	2
		Karakteristik Laporan Keuangan	N6	Deductive	1	1	2
		Tingkat Transparansi	N7	Deductive	1	1	2

##### a) Penyajian Laporan Keuangan

Pedoman standar akuntansi pemerintah basis akrual mengatur banyak pertimbangan matang dalam susunan laporan keuangan, panduan struktur laporan keuangan, serta standar dasar dalam laporan keuangan. Untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah daerah, maka penyusunannya sebaiknya dilengkapi dengan komponen-komponen yang terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*Budgetary Reports*) dan laporan finansial. Adapun dari hasil wawancara, untuk kesesuaian penyajian laporan keuangan tersebut, responden mengakui sebagai berikut:

*“Ya sudah, sudah sesuai. Kalau dia tidak sesuai kan ketika di audit sama BPK itukan ada di satu catatan toh.” (RP1, N5, P2).*

*“kalau prosesnya secara aplikasi.” (RP1, N5, P2).*

Artinya, BPKAD Kabupaten Sorong dalam penyajiannya telah sesuai dengan SAP basis akrual yang dimana penyajian tersebut dilakukan melalui aplikasi untuk pelaporan keuangan.

**b) Karakteristik Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan dapat dinilai berkualitas salah satunya apabila telah mencakup seluruh karakteristik seperti; relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Mengutip pertanyaan wawancara yang dilontarkan peneliti mengenai apakah informasi yang terdapat pada laporan keuangan yang disajikan telah memenuhi karakteristik, pihak BPKAD sebagai responden tidak memberikan penjelasan dengan jelas secara langsung baik lisan maupun tertulis. Melainkan, pihak responden kembali menunjukkan buku pedoman atau panduan terkait Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berlaku sebagai gambaran untuk peneliti. Sebaliknya, responden dari pihak inspektorat memberikan penjelasan secara langsung dan mengatakan;

*“Iya. Kenapa jawabannya ya, in karena kita di audit oleh BPK toh, jadi harus memenuhi unsur ini semua, kalau nggak berarti LKPDnya ditolak”.* (RP2, N6, P2).

Berdasarkan pengakuan diatas, diketahui bahwa laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sorong telah memenuhi karakteristik sebagaimana mestinya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangannya. Menurutny, jika tidak memenuhi karakteristik pelaporan tersebut dapat menyebabkan ditolaknya laporan keuangan yang telah dibuat. (sudah saya narasikan bu, untuk jawaban responden pertama)

**c) Tingkat Transparansi**

Tingkat transparansi pada suatu laporan keuangan menjadi bagian dari alat ukur guna melihat kualitas laporan keuangan tersebut. Dalam hal transparansi pelaporan keuangan, BPKAD Kabupaten Sorong menyatakan bahwa jelas sudah transparan, pengakuan ini diperoleh dari responden penelitian pertama, yang mengatakan

*“Di laporan keuangannya iya jelas”* (RP1, N7,P3).

Berdasarkan hal tersebut, menunjukkan bahwa dari segi penyajian dan pelaporan keuangan, BPKAD Kabupaten Sorong dinilai terbuka. Hal ini juga diperkuat oleh Bapak Mateus, dari Inspektorat yang menyatakan;

***“Sudah transparan dan akuntabel karena LKPD tersebut nantinya di audit oleh BPK perwakilan Provinsi Papua Barat Daya sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara”.*** (RP2,N7, P3).

Dari pernyataan-pernyataan diatas, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dibuat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sorong dapat dikatakan berkualitas, karena pada pelaporan keuangannya telah menerapkan transparansi. Namun, berdasarkan jawaban dari pihak BPKAD Kabupaten Sorong mengindikasikan bahwa penilaian mengenai transparansi responden terbatas pada aspek keuangan.

#### 4.2.3 Hambatan Implementasi

**Tabel 4. 4 Kode Tema dan Kategori Hambatan Implementasi**

TEMA	KT	KATEGORI	KK	Tipe Kode	Ref		Total
					Rp1	Rp2	
Hambatan Implementasi	P3	Hambatan	N8	Deductive	2	0	2

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara mengenai implementasi SAP, BPKAD Kabupaten Sorong mengalami hambatan mengenai penyajian laporan keuangan yang dimana masih bergantung pada kesiapan aplikasi. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Karmila sebagai penyusun laporan keuangan di BPKAD Kabupaten Sorong.

***“Tidak, paling dalam penyajian saja. Penyajian laporan keuangan, keterlambatannya itu ada toh”.***(RP1, N8, P4)

Dari hambatan tersebut pihak BPKAD mengaku belum didapatkan solusinya, karena hanya bisa menunggu kesiapan aplikasi yang akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangannya. Hal ini juga diketahui ketika peneliti melakukan wawancara mengenai bagaimana cara menghadapi kendala tersebut, yang dijawab responden seperti berikut;

*“Hemm kalau caranya tuh tetap harus menunggu kayak menyusun laporan keuangan kan dari aplikasi. Aplikasi itu belum bisa, belum, sesuai dan sudah pas baru kita menyajikan laporan keuangan berarti kan kita harus menunggu”.* (RP1,N8, P4)

Hal ini mengharuskan penyusun laporan menunggu aplikasi siap untuk digunakan, sehingga dapat menghambat efisiensi waktu untuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam menyajikan atau melaksanakan pelaporan keuangannya secara tepat waktu dan akurat.

#### 4.2.4 Evaluasi dan Pengawasan

**Tabel 4. 5 Kode Tema dan Kategori Evaluasi dan Pengawasan**

TEMA	KT	KATEGORI	KK	Tipe Kode	Ref		Total
					Rp1	Rp2	
Evaluasi dan Pengawasan	P4	Pengawasan	N9	Deductive	1	1	2

Evaluasi dan pengawasan menjadi satu di antara aspek yang vital dalam mendukung keberhasilan pengimplementasian standar akuntansi pemerintah atas laporan keuangan pemerintah daerah. Evaluasi dan pengawasan dilakukan dalam rangka memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat sudah sejalan dengan pedoman dan ketentuan standar yang berlaku. Pengawasan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sorong dilakukan dari dalam dan luar. Pengawasan dari dalam atau internal dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sorong dan pengawasan dari luar atau eksternal dilakukan oleh pihak BPK. Hal ini diketahui dari ibu Karmila staff BPKAD yang mengatakan;

*“Pengawasan sih itukan sudah langsung dari inspektorat toh. Kan laporan keuangan kan kita direvisi dulu sama inspektorat terus baru diperiksa sama BPK”.*(RP1, N9,P4).

Pernyataan ini juga didukung oleh Bapak Mateus dari pihak Inspektorat Kabupaten Sorong sebagai pihak pengawas internal, yang mengatakan;

*“prosesnya begini. BPKAD itu menyusun laporan keuangan, nah nanti inspektorat tuh mereview. Mereview semacam kayak periksa gitu toh, apakah sudah sesuai dengan kaidah-kaidah ini, karakteristiknya seperti Relevan, andal,*

*dapat dibandingkan, dan dapat dipahami, Kalau kita mereview tuh, dasarnya mereview harus sesuai dengan ini toh PP 71 inikan tentang SAP berbasis akrual. Nah itu, kira-kira laporan keuangan kita sudah sesuai atau belum. Penyusunannya berbasis akrual yang benar sudah sesuai SAPnya itu atau belum toh. Didukung juga dengan ini (Menunjuk buku)” (RP2, N9, P4).*

*“Nah jadi tadi, BPKAD menyusun laporan keuangan pemerintah kabupaten Sorong, inspektorat mereview. Setelah direview inspektorat, laporan keuangan itu kemudian diserahkan ke BPK)”. (RP2, N9, P4).*

Evaluasi dan Pengawasan pada BPKAD Kabupaten Sorong yang dilakukan oleh Inspektorat lalu selanjutnya oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) memiliki peranan yang cukup penting guna memastikan akuntabilitas, transparansi, juga efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sorong.

Dengan dilaksanakannya pengawasan berlapis ini, diharapkan potensi terjadinya pelanggaran dapat diminimalisir dan pengelolaan anggaran berjalan sesuai dengan ketentuan yang sedang berlaku.

### **4.3 Hasil Pembahasan Penelitian**

#### **4.3.1 Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah**

Pembahasan dilakukan dengan mengacu pada hasil dari analisis data penelitian yang telah diperoleh sebelumnya melalui wawancara, dan observasi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Berdasarkan data yang diperoleh, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Sorong telah proses pengimplementasian standar akuntansi pemerintah pada laporan keuangan pemerintah daerah telah dilakukan berdasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Rizqi Sukma Sari Putri (2023) dengan hasil penelitian yang juga menunjukkan bahwa pengimplementasian standar akuntansi pemerintah pada proses menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Labuhanbatu yang dijalankan BPKAD sudah beroperasi berdasarkan ketentuan pada peraturan perundangan.

Hasil dari penelitian ini, didapatkan melalui tahapan-tahapan dengan melihat beberapa aspek, yaitu (1) Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Basis Akrual,

yang dimana dapat dilihat dari Komponen Laporan Keuangan Pemerintah, Pencatatan akun belanja, serta pengakuan akun pendapatan dan beban. Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada basis akrual ini berbeda dengan standar yang berlaku sebelumnya, dimana pada basis akrual komponen pada laporan keuangan lebih lengkap, mulai dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Kemudian, selain dari komponen-komponen tersebut untuk melihat pengimplementasian Standar Akuntansi Pemerintah basis akrual dapat dilihat pula dari pencatatan akun belanja, yang dimana pada basis ini pencatatan dilakukan setelah belanja terealisasi, begitu pula untuk pengakuan akun pendapatan dan beban yang dicatat setelah pendapatan benar-benar diterima. (2) Penyajian Laporan Keuangan, dimana pada dalam penyajian laporan keuangan harus memenuhi karakteristik seperti Relevan, Andal, Dapat dibandingkan, dan Dapat dipahami.

#### **4.3.2 Hambatan**

Berdasarkan hasil wawancara pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sorong, ditemukan hambatan yang terjadi dalam penyajian laporan keuangan berbasis akrual. Hambatan yang terjadi adalah terkait ketidaksiapan dan belum optimalnya aplikasi yang digunakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sorong untuk menyajikan pelaporannya. Aplikasi yang seharusnya menjadi alat bantu yang memfasilitasi proses pencatatan dan pelaporan keuangan justru kerap menjadi hambatan, karena fungsinya yang belum dapat digunakan dengan maksimal. Kondisi ini menjadi penyebab terjadinya keterlambatan dalam penyajian pelaporan keuangan. Namun, hingga saat ini pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sorong tidak dapat melakukan apapun selain menunggu kesiapan aplikasi untuk digunakan. Temuan pada penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Ullifah Yanti, Junaidi (2024) dimana pada penelitian tersebut ditemukan masalah yang cukup serius dari aplikasi yang digunakan yaitu SIPD RI. Ditemukan bahwa aplikasi yang digunakan masih dalam tahap pengembangan sehingga aplikasi belum berjalan dengan efektif dan para pegawai pun seringkali mengalami terjadinya

keterlambatan dan menghambat pekerjaan mereka. Berdasarkan hal tersebut, diambil kesimpulan bahwa temuan penelitian ini memperkuat bukti empiris terkait hambatan pada aplikasi pelaporan keuangan di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Mengacu pada temuan penelitian yang telah dideskripsikan diatas, maka peneliti menyajikan kesimpulan akhir seperti berikut;

1. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sorong telah mengimplementasikan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akruwal selaras dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 serta Perbup No. 23 Tahun 2015 mengenai SAP Kab. Sorong, dan Perbup No. 27 Tahun 2017 mengenai perubahan atas perbup Sorong No. 22 Tahun 2015 mengenai kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sorong. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sorong pun telah memenuhi karakteristik seperti; relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.
2. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sorong mengalami hambatan dalam proses pelaporan keuangannya, yang dimana penyajian laporan keuangan bergantung pada kesiapan aplikasi. Karena kesiapan aplikasi yang belum bisa digunakan, akibatnya tim penyusun di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sorong pun sering mengalami keterlambatan dalam melaksanakan tanggungjawab pelaporannya. Namun, hingga kini belum ada solusi bagi penyusun untuk mengatasi hambatan yang terjadi. Penyusun laporan hanya menunggu kesiapan aplikasi saja.

#### **5.2 Keterbatasan Penelitian**

Pada penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan, salah satunya adalah tidak didapatkan data sekunder yang dibutuhkan, seperti laporan keuangan secara menyeluruh, dokumen pendukung pedoman standar akuntansi yang terdapat oleh BPKAD Kabupaten Sorong. Akibatnya, analisis dalam penelitian ini lebih banyak bergantung pada data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Selain itu, dalam melakukan wawancara peneliti juga mengalami keterbatasan karena responden tidak sepenuhnya responsif dan terbuka dalam memberikan jawaban. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh kurangnya kepercayaan responden kepada wawancara untuk menyampaikan informasi secara jelas.

### **5.3 Saran**

#### **5.3.1 Saran untuk BPKAD Kabupaten Sorong**

1. Berdasarkan keterbatasan permasalahan yang muncul di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sorong, karenanya peneliti mengusulkan saran agar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kesiapan aplikasi keuangan yang digunakan untuk menyajikan laporan keuangan. Peningkatan stabilitas terhadap aplikasi yang digunakan sangat penting, agar proses penyajian laporan keuangan dapat berjalan lebih efektif dan tepat waktu, dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas keuangan pemerintah.
2. Penyediaan Informasi Keuangan secara Digital, agar memudahkan masyarakat ataupun pihak terkait untuk dapat mengetahui perkembangan keuangan daerah secara lebih mudah dan cepat.

#### **5.3.2 Saran untuk Peneliti Selanjutnya**

Dari keterbatasan pada penelitian ini disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk lebih dahulu menmbangun komunikasi serta koordinasi dengan pihak terkait, guna dapat memperoleh akses terhadap data sekunder yang dibutuhkan secara lengkap dan akurat. Selain itu, disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk menggunakan metode campuran (*Mix Method*), yaitu penggabungan antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif, agar penelitian selanjutnya dapat memperoleh hasil yang lebih komprehensif dan mendalam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afriyeni, P., Zuliyana, S., & Asrina, S. (2024). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaL Pada Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, 1(4), 474-485.
- Alal Maula, M. I., & Wibowo, P. (2022). Meneropong Determinan Opini Lkpd Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. *Bina Ekonomi*, 26 (1), 23–37.
- Ariyanto, S. (2020). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun 2018. *Valuta*, 6(1), 41-54.
- Fatma, D. A. (2017). Analisis kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (studi kasus pada satuan kerja perangkat daerah kabupaten serdang bedagai) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Halim, A., & Kusufi, M.S. (2014). Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik (Edisi ke-2). Salemba Empat.
- Hardiansyah, D., & Hasanudin, H. (2024). Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia (Sdm) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(5), 4135-4169.
- Haq, K. (2023). Implementasi Metode Accrual Basis Pada Sistem Informasi Keuangan. 4(2), 562–568. <https://doi.org/10.47065/josh.v4i2.2924>
- Indrayani, K. D., & Widiastuti, H. (2020). Pengaruh penerapan system akuntansi keuangan pemerintah daerah dan system pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan kompetensi sumber daya manusia sebagai variable moderasi (studi empiris pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Klaten). *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 1-16.
- Jauhari, H., & Hazisma, S. (2021). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

- Pemerintah. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 104-121.
- Kuntadi, C., Saragi, J. E. M., & Syafira, S. I. (2022). Pengaruh standard akuntansi pemerintah, system pengendalian internal pemerintah, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 3(5), 458-468.
- Patty, M. A. (2024). Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Bpkad Kota Sorong. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(4), 5462-5470.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Putra, S. A., & Varina, R. J. (2021). Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI dalam Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 1(2), 85–98. <https://doi.org/10.33701/jtpm.v1i2.2071>
- Rahmawati, S., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah, Sosialisasi Pelaporan Akuntansi Pemerintah, Penyetaraan Pelaporan pada Kantor Desa Karang Satria. *Jurnal Sosial Teknologi*, 3(4), 289-301.
- Rosana, L., & Bharata, R. W. (2023). Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan. *Jurnalku*, 3(1), 23-34.
- Sari, A., & Kusmilawaty, K. (2023). Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI Untuk Mewujudkan Laporan Keuangan Yang Berkualitas (Implementation of Accrual-Based Government Accounting Standards to Realize Quality Financial Reports). *Akuntansi Bisnis & Manajemen (ABM)*, 30(1).
- Sari, F. M. (2022). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah, Good Governance dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi

- Empiris pada Kabupaten Batang). *JAKA (Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Auditing)*, 3(1).
- Siahaan, S. B., & Simanjuntak, A. (2020). Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah, Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara). *Jurnal Manajemen*, 1(2), 129-138.
- Sudaryati, E., & Permana, T. D. (2020). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaL Pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.20473/baki.v5i1.16965>
- Syairozi, M. I., Pambudy, A. P., & Yaskun, M. (2021). Analisis Penerapan Good Governance dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah. *Prosiding Penelitian Pendidikan dan Pengabdian 2021*, 1(1), 49-59.
- Yanti, U., & Junaidi, J. (2024). Tinjauan Atas Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Transisi SIPD ke SIPD RI pada BPKAD Mojokerto. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8 (3), 28-38
- Yusuf, D. (2020). Analisis Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 3(8), 421-429.

**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**

## Lampiran 1 Surat Ijin Penelitian



### PEMERINTAH KABUPATEN SORONG

#### BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Klamono Km. 24 Kompleks Kantor Bupati Sorong

#### REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070 / 75 / 2025

- a. Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 1983 tentang Pedoman Sumber dan Potensi sumberdaya Daerah;
  2. Instruksi Gubernur Provinsi Irian Jaya Nomor : 4 Tahun 1992 dan Instruksi Bupati Sorong Nomor 14 / Instruksi / 1992 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah Kabupaten dan Kota;
  3. Keputusan Dirjen Sosial Politik Depdagri Nomor : 14 tahun 1981 tentang Surat Pemberitahuan Penelitian dan Praktek Kerja Lapangan (PKL);
  4. Peraturan Daerah Nomor : 7 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sorong.
- b. Menimbang : Surat dari Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humanior Nomor : 125/1.3.AU/FEBIRA/D/2025. Perihal Izin Penelitian.

#### MEMBERITAHUKAN BAHWA :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| a. Nama               | : PUTRI NUR ISNAINI   |
| b. NIM/KTP            | : 146220121010 / 9201074607030003   |
| c. Tempat/Tgl.Lahir   | : Klang, 06 Juli 2003   |
| d. Nomor HP/Identitas | : 085157603600  |
| e. Agama              | : Islam   |
| f. Pekerjaan          | : Mahasiswa   |
| g. Alamat             | : Jalan Makam RT.003/RW.003<br>Kelurahan Malasom, Distrik Aimas<br>Kabupaten Sorong                           |
| h. Fakultas           | : Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humanior  |
| i. Program Studi      | : Akuntansi   |
| j. Judul Proposal     | : Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Pada<br>Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di<br>Kabupaten Sorong |
| k. Lokasi Penelitian  | : 1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah<br>Kabupaten Sorong<br>2. Inspektorat Kabupaten Sorong        |
| l. Lama Penelitian    | : 07 Mei s/d 21 Mei 2025  |

Sehubungan dengan hal tersebut diatas pada prinsipnya kami tidak keberatan atas permohonan dimaksud dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum pelaksanaan kegiatan harus melapor kedatangan kepada Pemerintah setempat dan Aparat Keamanan terkait;
2. Surat rekomendasi ini berlaku hanya untuk kegiatan penelitian tersebut diatas;
3. Mentaati ketentuan dan perundang - undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat masyarakat setempat;
4. Surat Ijin ini akan dicabut atau dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang ijin ini melanggar, tidak mengindahkan atau mentaati ketentuan ijin dan hukum serta adat istiadat setempat;

5. Apabila masa berlaku Surat Ijin Penelitian atau PKL Rekomendasi ini sudah berakhir sedangkan Penelitian atau PKL belum selesai, dapat di perpanjangan ijin Penelitian atau PKL ini harus diajukan oleh Instansi pemohon dan atau yang bersangkutan;
6. Setelah selesai penelitian agar dapat melapor kembali kepada Bupati cq. Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Sorong;
7. Surat rekomendasi ini berlaku dari tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal **07 Mei s/d 21 Mei 2025**.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Aimas, Tanggal 8 Mei 2025

An. BUPATI SORONG  
KEPALA BADAN  
  
ADRI E. TIMBAN, SH  
PEMBIWA UTAMA MUDA  
NIP. 19670407 199401 1 002

Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Sorong (Sebagai Laporan);  
Cq Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Sorong
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sorong;
3. Inspektorat Kabupaten Sorong;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

## **Lampiran 2 Instrumen Wawancara BPKAD**

### **BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SORONG**

#### **A. Informasi Umum Responden**

1. Nama:
2. Jabatan:

#### **B. Pembuka**

1. Bisakah Bapak/Ibu memperkenalkan nama Bapak/Ibu?
2. Berapa lama Bapak/Ibu bekerja di instansi ini?
3. Dibagian apakah Bapak/Ibu ditugaskan?
4. Apa peranan Bapak/Ibu dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah?

#### **C. Implementasi dan Kesesuaian standar**

1. Apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual?
2. Bagaimana instansi bapak/ibu menerapkan basis akrual dalam penyusunan laporan keuangan ?
3. Sejauh mana laporan keuangan pemerintah daerah telah sesuai dengan SAP berbasis akrual dalam hal penyajian, klasifikasi, dan pengungkapan informasi keuangan?
4. Apakah dalam laporan keuangan pada instansi bapak/ibu mengakui adanya pendapatan dan beban sesuai dengan prinsip akuntansi berbasis akrual?
5. Apakah aset dan kewajiban dalam laporan keuangan instansi bapak/ibu telah dicatat berdasarkan prinsip akrual, bukan kas?

#### **D. Penyajian Laporan Keuangan**

1. Apakah laporan keuangan pada instansi ini telah terdiri dari:
  - Laporan Realisasi Anggaran
  - Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih,
  - Neraca,
  - Laporan Operasional,
  - Laporan Arus Kas,

- Laporan Perubahan Ekuitas, dan
  - Catatan atas Laporan Keuangan
2. Apakah informasi dalam laporan keuangan telah memenuhi karakteristik seperti; Relevan, Andal, Dapat dibandingkan, dan Dapat dipahami?
  3. Bagaimana tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah di BPKAD Kab. Sorong?

#### **E. Hambatan/Tantangan Implementasi**

1. Apakah terdapat kendala yang terjadi dalam mengimplementasikan Standar Akuntansi Pemerintah pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
2. Jika memang terdapat kendala, bisa disebutkan kendala atau tantangan apa saja yang terjadi?
3. Bagaimana cara Bapak/Ibu menghadapi kendala tersebut?
4. Bagaimana mekanisme evaluasi dan pengawasan terhadap penerapan Standar Akuntansi Pemerintah pada instansi ini?

#### **F. Penutup**

1. Menurut anda apakah standar akuntansi pemerintah yang berlaku mempengaruhi transparansi dan akuntabilitas?
2. Apa harapan anda kedepannya terkait penerapan standar akuntansi pemerintah di instansi bapak/ibu?

### **Lampiran 3 Lampiran Instrumen Wawancara Inspektorat**

#### **INSPEKTORAT KABUPATEN SORONG**

##### **A. Informasi Umum Responden**

1. Nama:
2. Jabatan:

##### **B. Pembuka**

1. Bisakah Bapak/Ibu memperkenalkan nama Bapak/Ibu?
2. Berapa lama Bapak/Ibu bekerja di instansi ini?
3. Dibagian apakah Bapak/Ibu ditugaskan?

##### **C. Implementasi dan Kesesuaian standar**

1. Sebagai pemeriksa apakah laporan keuangan yang telah disusun oleh BPKAD Kab. Sorong sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual?
2. Apakah BPKAD Kab. Sorong telah menerapkan basis akrual dalam penyusunan laporan keuangan ?
3. Sejauh mana laporan keuangan pemerintah daerah yang disusun oleh BPKAD telah sesuai dengan SAP berbasis akrual dalam hal penyajian, klasifikasi, dan pengungkapan informasi keuangan?
4. Apakah dalam laporan keuangan yang disusun oleh BPKAD mengakui adanya pendapatan dan beban sesuai dengan prinsip akuntansi berbasis akrual?
5. Apakah aset dan kewajiban dalam laporan keuangan yang disusun oleh BPKAD telah dicatat berdasarkan prinsip akrual, bukan kas?

##### **D. Penyajian Laporan Keuangan**

1. Apakah laporan keuangan yang disusun oleh BPKAD Kab. Sorong telah terdiri dari:
  - Laporan Realisasi Anggaran
  - Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih,
  - Neraca,
  - Laporan Operasional,
  - Laporan Arus Kas,

- Laporan Perubahan Ekuitas, dan
  - Catatan atas Laporan Keuangan
2. Apakah informasi dalam laporan keuangan yang telah disusun oleh BPKAD memenuhi karakteristik seperti; Relevan, Andal, Dapat dibandingkan, dan Dapat dipahami?
  3. Bagaimana tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah di BPKAD Kab. Sorong?

#### Lampiran 4 Lampiran Transkrip Wawancara

### BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SORONG

#### A. Biodata Informan

Informan	Karmila Sari
Jabatan	Staff Akuntansi
Durasi wawancara	7 menit 11 detik
Kode Informan	RP1
Kode Peneliti	P

#### B. Hasil Wawancara

Inisial	Percakapan	Kategori	KK	KT
P	Sebelumnya perkenalkan nama saya Putri Nur Isnaini, mahasiswa dari UNIMUDA Sorong yang sedang melakukan penelitian skripsi. Jadi disini ee saya ingin menanyakan dan sekaligus belajar mengenai implementasi standar akuntansi pemerintah.			
RP	Kalau bicara SAP bisa saja dicari di google, itukan sudah ada, itu sama saja toh. Jadi, kan kalau SAP itu kan berarti dia pake apa? Akuntansi berbasis apa? akrual toh? Bukan berbasis kas lagi kan? Itu aja dulu. Nah terus yang dia punya itunya kan ada			

	dengan SAP kan kita pake yang laporan keuangannya ada lima item toh.			
P	Iya baik bu. Oh ya, boleh memperkenalkan namanya bu?			
RP	Karmila Sari			
P	Ibu sudah berapa lama bekerja di instansi ini?			
RP	Sudah dari 2005, sudah 20 tahun toh?			
P	Oh iya, 2005 ya bu.			
RP	Mengangguk			
P	Di bagian apa ibu ditugaskan?			
RP	Akuntansi			
P	Apa peranan ibu dalam proses penyusunan laporan keuangan?			
RP	Peranannya apa? Pembuat?			
P	Oh penyusun ya bu?			
Rp	Iya toh, penyusun toh?			
P	Untuk ee memasuki implementasinya apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP basis akrual.			
RP	<b>Sudah ada dalam sini</b> (menunjuk buku pedoman penyusunan laporan keuangan	Penerapan SAP berbasis akrual	N1	P1

	pemerintah daerah)			
P	Berarti sudah ya bu ya			
RP	Ah ini maksudnya makanya baca saja laporan keuangan toh, sudah ada toh?			
P	Iya			
RP	<b>Sudah pakai itu, sejalan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 2010 lampirannya tentang SAP</b> itukan yang tadi sa bilang toh?	Penerapan SAP berbasis akrual	N1	P1
P	Iya, yang kedua bagaimana instansi ini menerapkan basis akrual dalam penyusunannya?			
RP	Maksudnya bagaimana?			
P	Mungkin prosesnya gitu bu?			
RP	Prosesnya kan, <b>kalau prosesnya secara aplikasi.</b>	Penyajian Laporan Keuangan	N5	P2
P	Sejauh mana laporan keuangan pemerintah daerah telah sesuai dengan SAP basis akrual dalam hal penyajian, klasifikasi, dan pengungkapan informasi keuangan			
RP	Ya sudah, <b>sudah sesuai. Kalau dia tidak sesuai kan ketika di audit sama BPK itukan ada di satu catatan toh.</b>	-Penyajian Laporan Keuangan -Mekanisme Pengawasan	N5, N9	P2, P4

P	Apakah dalam laporan keuangan pada instansi ini mengakui adanya pendapatan dan beban sesuai prinsip akuntansi basis akrual?			
RP	<b>Pasti to, kan tidak mungkin kita keluar dari situ</b> (Menunjuk buku pedoman laporan keuangan pemerintah daerah)	Pengakuan akun pendapatan dan beban	N4	P1
P	Apakah aset dan kewajiban dalam pelaporan keuangan instansi ini juga telah dicatat berdasarkan prinsip Akuntansi...			
RP	Oke..(menunjuk buku pedoman laporan keuangan pemerintah daerah)			
P	Untuk penyajiannya ee sudah terdiri dari tujuh komponen itu ya bu laporan realisasinya?			
RP	Tertawa ( <b>menunjuk buku pedoman laporan keuangan pemerintah daerah</b> )	Komponen Laporan Keuangan	N2	P1
P	Kalau untuk, apakah informasi laporan keuangan telah memenuhi karakteristik seperti relevan, andal, dapat dibandingkan?			
RP	( <b>Menunjuk buku pedoman laporan keuangan</b> )	Karakteristik Laporan	N6	P2

	<b>pemerintah daerah)</b>	Keuangan		
P	Bagaimana tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam penyajian laporan keuangan pemerintah dalam BPKAD ini?			
RP	Maksudnya transparansinya bagaimana?			
P	Mungkin bisa dijelaskan serinci-rincinya bu.			
RP	Rincinya dimana?			
P	Di laporan keuangannya			
RP	<b>Di laporan keuangannya iya jelas</b>	Tingkat Transparansi	N7	P3
P	Dan untuk hambatan bu, apakah terdapat kendala yang terjadi dalam mengimplementasikan standar akuntansi pemerintah ini?			
RP	(Menggeleng)			
P	Tidak ada ya bu?			
RP	<b>Tidak, paling dalam penyajian saja. Penyajian laporan keuangan, keterlambatannya itu ada toh.</b>	Hambatan	N8	P4
P	Iya bu, jadi hambatannya hanya dari keterlambatan itu ya bu. Kalau begitu bagaimana cara menghadapi kendala tersebut bu?			

RP	Hemm kalau caranya tuh tetap harus menunggu kayak menyusun laporan keuangan dari aplikasi. <b>Aplikasi itu belum bisa, belum, sesuai dan pas baru kita menyajikan laporan keuangan berarti kan kita harus menunggu.</b>	Hambatan	N8	P4
P	Bagaimana mekanisme evaluasi dan pengawasan terhadap penerapan standar, apakah ada pengawasan langsung begitu bu?			
RP	<b>Pengawasan sih itukan sudah langsung dari inspektorat toh. Kan laporan keuangan kan kita direvisi dulu sama inspektorat terus baru diperiksa sama BPK.</b>	Pengawasan	N9	P4
P	Menurut ibu apakah standar akuntansi pemerintah yang saat ini berlaku mempengaruhi transparansi dan akuntabilitas bu?			
RP	Tidak			
P	Kalau begitu apa harapan ibu terkait penerapan standar akuntansi pemerintah di BPKAD ini			

RP	Harapannya tidak ada, karena kan kita hanya mengikuti ini pembuatan laporan keuangan kan kita mengikuti SAP toh.			
P	Iya			
RP	Kan SAP ini sudah baku, jadi ee inikan paling tergantung terkait aplikasi, mungkin aplikasi yang lebih baik supaya kita bisa cepat menyusun laporan keuangan. Kalau untuk harapan tentang SAP tuh tidak ada, itu sudah paten. Iya toh?			
P	Iya. Kalau begitu itu saja bu mungkin pertanyaan dari saya. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih banyak bu.			
RP	Iyaa			

## Lampiran 5 Lampiran Transkrip Wawancara

### INSPEKTORAT KABUPATEN SORONG

#### A. Biodata Informan

<b>Nama Informan</b>	<b>Mateus Welerubun</b>
<b>Jabatan</b>	<b>KASUBAB Evaluasi dan Pelaporan</b>
<b>Durasi Wawancara</b>	<b>17 menit 41 detik</b>
<b>Kode Informan</b>	<b>RP2</b>
<b>Kode Peneliti</b>	<b>P</b>

#### B. Hasil Wawancara

<b>Inisial</b>	<b>Percakapan</b>	<b>Kategori</b>	<b>KK</b>	<b>KT</b>
P	Bisa memperkenalkan namanya bapak?			
RP2	Mateus Welerubun			
P	Berapa lama bapak bekerja di instansi ini?			
RP2	Dari 2022, berarti sudah 3 tahun.			
P	Dibagian apa Bapak ditugaskan?			
RP2	Sekretariat sebagai Kasubab Evaluasi dan Pelaporan.			
P	Sebagai pemeriksa apakah laporan keuangan yang telah disusun oleh BPKAD Kab. Sorong sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual?			
RP2	<b>Ya</b>	Penerapan	N1	P1

		SAP Basis Akruwal		
P	Apakah BPKAD Kab. Sorong telah menerapkan basis akruwal dalam penyusunan laporan keuangan?			
RP2	<b>Ya. Sudah.</b>	Penerapan SAP Berbasis Akruwal	N1	P1
P	Sejauh mana laporan keuangan pemerintah daerah yang disusun oleh BPKAD telah sesuai dengan SAP berbasis akruwal dalam hal penyajian, klasifikasi, dan pengungkapan informasi keuangan?			
RP2	<b>LKPD Kabupaten Sorong yang disusun oleh BPKAD telah sesuai dengan SAP berbasis akruwal, meliputi semua akun belanja sebagaimana PP 71 Tahun 2010, serta Perbup Nomor 23 Tahun 2015 tentang SAP Kab. Sorong, dan Perbup Nomor 27 Tahun 2017 tentang perubahan atas perbup Sorong Nomor 22 Tahun 2015 tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sorong.</b>	-Penerapan SAP Berbasis Akruwal -Pencatatan Akun Belanja	N1, N3	P1

P	Apakah dalam laporan keuangan yang disusun oleh BPKAD mengakui adanya pendapatan dan beban sesuai dengan prinsip akuntansi berbasis akrual?			
RP2	<b>Iya.</b>	Pengakuan akun pendapatan dan beban	N4	P1
P	Apakah aset dan kewajiban dalam laporan keuangan yang disusun oleh BPKAD telah dicatat berdasarkan prinsip akrual, bukan kas?			
RP2	<b>Iya.</b>	Penerapan SAP berbasis akrual	N1	P1
P	Apakah laporan keuangan yang disusun oleh BPKAD Kab. Sorong telah terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Realisasi Anggaran</li> <li>• Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih,</li> <li>• Neraca,</li> <li>• Laporan Operasional,</li> <li>• Laporan Arus Kas,</li> <li>• Laporan Perubahan Ekuitas, dan</li> </ul>			

RP2	<p>Tujuh.</p> <p>Satu, Laporan Realisasi Anggaran</p> <p>Dua, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih,</p> <p>Tiga, Neraca,</p> <p>Empat, Laporan Operasional,</p> <p>Lima, Laporan Arus Kas,</p> <p>Enam, Laporan Perubahan Ekuitas dan tujuh Catatan atas Laporan Keuangan.</p> <p>Ini jawabnya bagaimana?</p>			
P	<p>Em, mungkin bisa langsung dijawab satu kali aja pak, nggak perlu dijabarkan satu-satu. Itukan pertanyaannya “apakah laporan keuangan yang disusun oleh BPKAD Kab. Sorong telah terdiri dari tujuh komponen tersebut”</p>			
RP2	<p><b>Laporan keuangan Pemda harus terdiri dari tujuh ini toh.</b></p>	<p>Komponen Laporan Keuangan</p>	N2	P1
P	Iya.			
RP2	Jadi, makanya saya hitung tadi.			
P	Iya pak.			
P	<p>Apakah informasi dalam laporan keuangan yang telah disusun oleh BPKAD memenuhi karakteristik seperti; Relevan, Andal, Dapat</p>			

	dibandingkan, dan Dapat dipahami?			
RP2	Iya. Kenapa jawabannya <b>ya, ini karena kita di audit oleh BPK toh, jadi harus memenuhi unsur ini semua, kalau nggak berarti LKPDnya ditolak</b>	Karakteristik Laporan Keuangan	N6	P2
P	Jadi dari BPKAD ke inspektorat, inspektorat ke BPK ya pak?			
RP2	Nggak, jadi prosesnya begini. BPKAD itu menyusun laporan keuangan, nah nanti inspektorat tuh mereview. Mereview semacam kayak periksa gitu toh, apakah sudah sesuai dengan kaidah-kaidah ini, karakteristiknya seperti Relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami, Kalau kita mereview tuh, dasarnya mereview harus sesuai dengan ini toh PP 71 inikan tentang SAP berbasis akrual. Nah itu, kira-kira laporan keuangan kita sudah sesuai atau belum. Penyusunannya berbasis akrual yang benar sudah sesuai SAPnya itu atau belum toh. Didukung juga dengan ini	Pengawasan	N9	P4

	<p>(Menunjuk buku), peraturan Bupati untuk kebijakan akuntansi dan SAP pemerintah Kabupaten Sorong. Kan kalau PP itukan dia aturan besarnya, jadi itu pedoman yang harus diikuti oleh seluruh pemerintah Indonesia. Tapi kan, pedoman itu harus sesuai lagi dengan karakteristik pemerintah daerah masing-masing toh. Nah nanti, turunannya itu pemda bikin perbup. Perbup itu lebih spesifik, jadi dia berbasis aktual tapi lebih spesifik sesuai dengan karakteristik daerah. Nah ini nih, harusnya pertanyaannya juga melihat ini (menunjuk buku perbup tentang kebijakan akuntansi pemerintah Kab. Sorong). Nah jadi tadi, <b>BPKAD menyusun laporan keuangan pemerintah kabupaten Sorong, inspektorat mereview.</b> Kenapa harus direview? Karena itu memang inspektorat harus didalam review itu kita memberi keyakinan terbatas. Artinya kita menjamin bahwa penyusunan laporan keuangan</p>			
--	---	--	--	--

	<p>itu sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Setelah direview inspektorat, laporan keuangan itu kemudian diserahkan ke BPK, yang namanya laporan keuangan un-audited. Nah, jadi diserahkan ke BPK, nanti di BPK mempelajari dulu kira-kira seminggu atau dua minggu berapa lama waktunya terserah mereka toh. Nah setelah di pelajari oleh BPK kemudian mereka melakukan audit atas laporan keuangan pemerintah daerah. Jadi prosedurnya kira-kira begitu. Jadi, sebenarnya sebelum pemeriksaan BPK, ada yang namanya pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan atas laporan keuangan. Cuma, itu laporan keuangannya belum jadi waktu pemeriksaan pendahuluan. Nah mereka baru memeriksa terkait akun-akun belanja di pemda tu yang kira-kira berpotensi ada terjadinya pelanggaran. Kira-kira berpotensi untuk ada</p>			
--	--	--	--	--

	<p>temuan gitu toh, makanya temuannya nanti sifatnya masih temuan sementara kalau di pendahuluan toh. Nah setelah, selesai pendahuluan tunggu laporan keuangannya jadi, BPKAD selesai menyusun dan melaporkan ke inspektorat untuk mereview, setelah direview hasil review itu misalnya ada perbaikan, diminta BPKAD memperbaiki. Nah setelah diperbaiki diserahkanlah ke BPK. BPK itu dia Instansi pemeriksa eksternal, kalau inspektorat itu instansi pemeriksa internal.</p>			
P	<p>Iya pak. Bagaimana tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah di BPKAD Kab. Sorong?</p>			
RP2	<p><b>Sudah transparan dan akuntabel karena LKPD tersebut nantinya di audit oleh BPK perwakilan Provinsi Papua Barat Daya sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara.</b></p>	<p>Tingkat Transparansi</p>	N7	P3

**Lampiran 6 Daftar Tema Dan Kode**

TEMA	KT	KATEGORI	KK	Tipe Kode	Ref		Total
					Rp1	Rp2	
Implementasi SAP Berbasis Akrua	P1	Penerapan SAP	N1	Deductive	2	4	6
		Komponen Laporan Keuangan	N2	Deductive	1	1	2
		Pencatatan akun belanja	N3	Deductive	0	1	1
		Pengakuan akun pendapatan dan beban	N4	Inductive	1	1	2
Kualitas Laporan Keuangan	P2	Penyajian Laporan Keuangan	N5	Deductive	2	0	2
		Karakteristik Laporan Keuangan	N6	Deductive	1	1	2
		Tingkat Transparansi	N7	Deductive	1	1	2
Hambatan Implementasi	P3	Hambatan	N8	Deductive	2	0	2
Evaluasi dan Pengawasan	P4	Pengawasan	N9	Deductive	1	1	2

## Lampiran 7 Member Checking

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MATEUS WELEPUBUN

Jenis Kelamin : LAKI - LAKI

Jabatan : KACUBAS EVALUASI DAN PELAPORAN INSPEKTORAT  
KAB. SORONG.

Menyatakan telah diwawancarai oleh :

Nama : Putri Nur Isnaini

NIM : 146220121010

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi Bisnis dan Humaniora

Judul Penelitian : Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus; Badan Pengelola Keuangan, Anggaran dan Aset Daerah Kabupaten Sorong).

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dengan sungguh-sungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sorong, 19/05..... 2025

Responden

  
MATEUS WELEPUBUN

## Lampiran 8 Dokumentasi

### INSPEKTORAT KABUPATEN SORONG

